



**PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
TAHUN 1945-1950**

SKRIPSI

Oleh

**Ony Widiarto
NIM 140210302018**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
TAHUN 1945-1950**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Ony Widiarto
NIM 140210302018**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala ketulusan dan keikhlasan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Susianah dan Bapak Widjie Swandoyo, kakak tercinta Dany Juniarto dan adik tercinta Gilang Arif Ramadhan, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan curahan kasih sayang selama ini;
2. Kekasihku Ana Magfirah, S.Pd;
3. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang bermanfaat, dan
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.

(Terjemahan Surat An-Nahl:90)¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Aljamil Al-quran Terjemahan*. Bekasi: Cipta Bagus Segara

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Ony Widiarto

NIM : 140210302018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul ‘Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950’ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dan pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Juni 2018

Ony Widiarto
140210302018

SKRIPSI

**PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
TAHUN 1945-1950**



Oleh

**Ony Widiarto
NIM 140210302018**

Pembimbing

**Dosen Pembimbing I : Drs. Sugiyanto, M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Drs. Marjono, M.Hum.**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
TAHUN 1945-1950**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Nama Mahasiswa : Ony Widiarto
NIM : 140210302018
Angkatan Tahun : 2014
Daerah Asal : Jember
Tempat, tanggal lahir : Jember, 23 Februari 1996
**Jurusan / Program : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial /
Pendidikan Sejarah**

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Drs. Sugiyanto, M.Hum.
NIP 19570220 198503 1003

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP 19600422 198802 1 001

PENGESAHAN

Skripsi “Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

hari : Jumat
tanggal : 08 Juni 2018
tempat : FKIP Gedung I Ruang 44A 101

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sugiyanto, M.Hum.
NIP 19570220 198503 1 003

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP 19600422 198802 1001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP 19580823 198702 1 001

Dr. Nurul Umamah, M.Pd.
NIP 19690204 199303 2 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Dafik, M.Sc, Ph.D
NIP 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950; Ony Widiarto; 2016; 87 halaman + xiv; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

Latar belakang penelitian ini yaitu setelah bangsa Indonesia merdeka hingga terjadinya perubahan bentuk negara Indonesia yang semula sejak KMB (Konferensi Meja Bundar) adalah negara federal kembali menjadi bentuk negara kesatuan (1945-1950). Kondisi Indonesia yang masih kacau baik bidang sosial, politik dan ekonomi mendorong Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengaplikasikan tindakan penyelamatan Republik Indonesia. Sikap demokrasi dan optimis Sultan Hamengku Buwono IX yang dipelajarinya sejak kecil menjadi landasan untuk memutuskan berbagai tindakan. Proses pengamanan masa awal kemerdekaan hingga akhir Agresi II, penataan negara dimasa peralihan untuk mempersiapkan KMB, penandatanganan penyerahan kedaulatan KMB di Jakarta, dan menjaga pertahanan negara pasca KMB dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Hal ini mengakibatkan proses integrasi antara negara-negara bagian RIS bersama RI.

Penelitian ini mengkaji beberapa masalah ; (1) bagaimana latar belakang Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia; (2) bagaimana tindakan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah: (1) mengkaji secara mendalam latar belakang Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia; (2) mengkaji secara mendalam tindakan atau strategi Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950. Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti adalah (1) bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk mendalami materi sejarah pada masa 1945-1950 dan tokoh Sultan Hamengku Buwono IX; (2) bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi mengenai sejarah Indonesia masa 1945-1950 dan peranan tokoh

Sultan Hamengku Buwono IX; (3) bagi pemuda, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk mencintai Republik Indonesia, menjaga persatuan, dan menghargai pengorbanan para pahlawan; (4) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang langkah-langkahnya adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Konflik milik Lewis Coser, sementara pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi politik.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Sultan Hamengku Buwono IX berhasil membantu Republik Indonesia untuk memindah ibukota ke Yogyakarta untuk menghindari konflik dengan Belanda di Jakarta. (2) Selain memindahkan ibu kota, Sultan memberikan berbagai fasilitas dan hartanya untuk berkorban mempertahankan Republik Indonesia. (3) Ketika Belanda menduduki Yogyakarta pada Agresi Militer II, Sultan Hamengku Buwono IX lewat serangan umum yang dirancangnya berhasil membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada dan harus dilanjutkan dalam meja perundingan. (4) Sultan mempersiapkan masa peralihan menuju KMB dan menjadi penerima mandat penandatanganan penyerahan kedaulatan KMB di Jakarta.

Bentuk federal yang tercipta dari KMB menciptakan suatu konflik di berbagai daerah Indonesia. Terdapat kelompok yang mendukung bentuk negara kesatuan dan kelompok federal yang lebih menginginkan Republik Indonesia Serikat harus tetap berdiri. Konflik yang terus berlanjut akhirnya menimbulkan pemberontakan dari Westerling di negara bagian Pasundan. Pemberontakan Westerling berhasil diketahui dan dicegah oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Tokoh federalis yang juga bekerjasama dengan Westerling, yaitu Sultan Hamid II berhasil ditangkap. Sehingga membuat gerakan penyatuan di berbagai daerah negara bagian semakin kuat dan terwujud pada 17 Agustus 1950.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Dafik, M.Sc., Ph.D selaku Dekan FKIP Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
5. Sugiyanto, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing utama, Drs. Marjono, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing anggota, Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Penguji I, dan Dr. Nurul Umamah, M.Pd. selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama perkuliahan;
7. Orang tua penulis, kakak, adik dan keluarga besar yang selalu memberi semangat;
8. sahabat-sahabatku Hasroqi Abdillah dan Nandra Prasetyo beserta teman-teman angkatan 2014 di Program Studi Pendidikan Sejarah lainnya yang telah memberikan dorongan semangat dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Jember, 08 Juni 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN RINGKASAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Judul.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	16
BAB 4. LATAR BELAKANG SULTAN HAMENGKU BUWONO IX	
MEMPERTAHANKAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN	
1945-1950.....	21
4.1 Sultan Hamengku Buwono IX Berjiwa Demokratis.....	21
4.2 Sultan Hamengku Buwono IX Berjiwa Optimis.....	28
BAB 5. PERAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX TAHUN 1945-	
1950.....	34

5.1 Peran Sultan Hamengku Buwono IX menghadapi Belanda Tahun 1945-1949.....	34
5.1.1 Peran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Perpindahan Ibukota RI ke Yogyakarta tahun 1946.....	35
5.1.2 Strategi Menghadapi Agresi Militer Belanda 1948-1949..	43
5.1.3 Perjuangan Diplomasi dalam KMB Tahun 1949.....	49
5.2. Peran Sultan Hamengku Buwono IX Menjaga Keamanan Negara Tahun.....	56
5.2.1 Peristiwa Westerling.....	58
5.2.2 Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	61
BAB 6. PENUTUP.....	65
6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Matrik Penelitian.....	72
Lampiran B. Surat Penelitian	73
Lampiran C. Amanat 30 Oktober 1945	74
Lampiran D. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Januari 1946.....	75
Lampiran E. Surat Kawat yang dikirimkan keluarga Simatupang terhadap Kolonel Hidayat di PDRI	76
Lampiran F. Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan No. S/4 Tahun 1949	77
Lampiran G. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan No. R.I./3 Tahun 1949, tentang Pembatasan Kemerdekaan Berkumpul dan Bersidang	79
Lampiran H. Foto	81

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan dan berbagai peranan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari jiwa optimis dan demokratisnya. Perpaduan corak pendidikan Dorodjatun (nama sebelum diangkat menjadi raja), yaitu pendidikan modern dan pendidikan tradisional di dalam keraton dapat membentuk jiwa demokratis dan optimis. Pendidikan modern dapat membuka wawasan luas secara global dan disertai watak kepribadian Jawa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran selalu melekat pada sosok Sultan Hamengku Buwono IX (Sunoyo, 2016:39). Keputusan terpenting terhadap Republik Indonesia dan Kasultanan Yogyakarta terlihat ketika Indonesia Merdeka. Pada saat itu diperlukan suatu keputusan yang tepat untuk kelangsungan Republik Indonesia dan Kasultanan Yogyakarta.

Menurut Baskoro dan Sunaryo (2011:39), Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disambut baik oleh Sultan Hamengku Buwono IX sebagai raja Kasultanan Yogyakarta. Sebelum Republik Indonesia merdeka, sebenarnya Kasultanan Yogyakarta telah menjadi negara yang berdaulat. Kasultanan Yogyakarta telah memiliki organisasi pemerintahan, rakyat, dan wilayah kekuasaan. Keadaan tersebut memenuhi syarat sebagai suatu wilayah yang dapat memutuskan kemerdekaannya sendiri. Namun sebaliknya, setelah Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, keputusan Sultan Hamengku Buwono IX adalah mendukung Republik Indonesia dan menjadikan Kasultanan Yogyakarta berada dalam wilayah Republik Indonesia.

Sultan Hamengku Buwono IX tidak hanya ikut bergabung dengan Republik Indonesia. Sementara kondisi di Ibukota Jakarta sedang berada dalam ancaman Belanda, yaitu pasukan Belanda berusaha untuk menahan para pemimpin Republik dan menghancurkan kekuatan Republik dengan dalih menghapuskan segala sesuatu yang berbau Jepang (Abdullah dan Lopian, 2012:196). Keamanan dan keselamatan di ibukota Republik Indonesia semakin tidak terjamin, maka tanggal 4 Januari 1946 pemerintah memindah ibukota

Republik Indonesia ke Yogyakarta. Presiden Sukarno yang berangkat menggunakan kereta api akhirnya sampai di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946 (Adams, 2014:284). Kedatangan Sukarno dan rombongan disambut Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Pindahan ibukota ke Yogyakarta membawa konsekuensi bahwa mulai saat itu Yogyakarta menjadi pusat pertahanan dan pemerintahan Republik Indonesia.

Sultan Hamengku Buwono IX tidak hanya berperan terhadap pindahan Republik Indonesia saja. Ketika di Yogyakarta terjadi kepadatan penduduk akibat banyaknya pengungsi pada masa Agresi Militer Belanda I, Sultan Hamengku Buwono IX membantu Republik Indonesia untuk menampung dan memberikan berbagai sumbangannya. Harta pribadi milik Sultan dikorbankan untuk kelangsungan Republik Indonesia serta rakyat yang berlindung di kota Yogyakarta. Jika dihitung, sumbangan harta yang di berikan untuk gaji para staf kenegaraan saja bisa mencapai 5 juta Gulden. Belum lagi tanah dan berbagai fasilitas milik keraton yang di gunakan untuk keperluan rakyat dan kelangsungan Republik Indonesia (Darban, 1998:50). Pengorbanan yang besar terhadap Republik Indonesia membuktikan bahwa Sultan benar-benar ingin merdeka dari kekuasaan asing. Selain itu, jiwa demokratis dan optimis selalu menjadi dasar tanggungjawab Sultan terhadap kelangsungan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tanggung jawab terbesar Sultan Hamengku Buwono IX, terjadi ketika pasukan Belanda berhasil menembus pertahanan di Yogyakarta. Presiden Sukarno, Sutan Syahrir selaku Perdana Menteri, dan beberapa Menteri beserta stafnya melakukan sidang darurat mengenai Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan jika Ibukota Yogyakarta dikuasai Belanda. Keputusan dalam sidang tersebut: pertama, para pemimpin tidak jadi meninggalkan kota; kedua, kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia akan dialihkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra ketika para pemimpin Republik Indonesia tertangkap Belanda; dan ketiga, Jenderal Sudirman akan memimpin perang gerilya di luar kota (Atmakusuma, 2011:69). Setelah Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan para pemimpin Republik Indonesia diasingkan. Belanda merasa berhasil melakukan Agresi Militer II dan menganggap bahwa

akan mudah merebut kekuasaan karena tidak adanya para pemimpin Republik Indonesia.

Pada saat para pemimpin diasingkan, ternyata Sultan Hamengku Buwono IX memiliki kontribusi besar kepada kelangsungan Republik Indonesia. Sultan Hamengku Buwono IX berhasil menentukan sikap, yaitu menolak seluruh bujukan Belanda dan tawaran Belanda. Tidak tanggung-tanggung, tawaran yang diberikan oleh Belanda adalah menjadikan Sultan Hamengku Buwono IX raja di pulau Jawa dan Madura. Penolakan tawaran tersebut mengakibatkan Sultan dikekang kebebasannya. Sultan tidak boleh keluar dari area keraton dan tidak boleh menerima tamu selain persetujuan Belanda (Baskoro dan Sunaryo, 2011:122). Hal ini tidak menyurutkan perlawanan Sultan terhadap Belanda. Sultan Hamengku Buwono IX saat itu tetap bertahan di keraton dan tidak bisa melakukan pergerakan di luar keraton. Sebagai Menteri Koordinator Keamanan keadaan seperti ini kemudian dimanfaatkan untuk menyusun strategi Serangan. Hal tersebut akhirnya berhasil menghasilkan serangan yang dilaksanakan pada 1 Maret 1949. Sultan Hamengku Buwono IX berperan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa pertahanan Republik Indonesia masih ada (Sumiyati dkk. 2001:46). Selain itu, Sultan Hamengku Buwono IX juga ingin memberikan semangat kepada rakyat, jika kemerdekaan Republik Indonesia harus terus diperjuangkan.

Hasil terbesar setelah pembuktian serangan TNI di Yogyakarta tersebut adalah diselenggarakan persetujuan Roem Royen. Setelah itu, Sukarno memberikan mandat kekuasaan penuh untuk mempersiapkan dan menerima pengembalian Republik Indonesia di Yogyakarta (Darban, 1998:47). Hal ini diberikan karena akan diadakan diplomasi tingkat lanjut antara Republik Indonesia dan Belanda, yaitu Konferensi Meja Bundar. Disisi lain, dalam perjuangan diplomasi Sultan Hamengku Buwono IX sering menjadi penasehat delegasi Republik Indonesia ketika melakukan perundingan dengan Belanda (Kutoyo, 1996:159). Pada 27 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar, Sultan Hamengku Buwono IX diberikan mandat penyerahan kedaulatan di Jakarta. Penyerahan kedaulatan itu ditandatangani oleh Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil Republik

Indonesia dan Johannes Lovink sebagai wakil Belanda. Perjanjian ini memutuskan terbentuknya Republik Indonesia Serikat.

Sistem pemerintahan federal yang terbentuk karena hasil KMB ternyata menimbulkan berbagai kondisi yang tidak stabil. Pertama, terdapat permasalahan dalam bidang keamanan dalam negeri. Salah satunya adalah gerakan dari Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Westerling dan Sultan Hamid II. APRA menginginkan untuk membentuk Negara sendiri, yaitu Negara Pasundan dan menculik para Menteri, terutama Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Gerakan ini berhasil digagalkan, sehingga Westerling dan Sultan Hamid II ditangkap oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Abdullah dan Lopian, 2012:9-10). Kedua, permasalahan mengenai tuntutan dari rakyat untuk mengganti sistem pemerintahan federal menjadi negara kesatuan. Permasalahan ini terwujud dan dapat diselesaikan, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan RI, Kabinet Natsir dilantik dan kebanyakan anggotanya merupakan orang-orang yang berpengalaman dan dihormati. Kedudukan di dalam kabinet terdapat orang-orang nonpartai tetapi sudah terbukti kemampuannya, antara lain Sultan Hamengku Buwono IX yang menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri, dr. Abdul Halim sebagai Menteri Pertahanan, dan Mr. Assaat sebagai Menteri Dalam Negeri (Abdullah dan Lopian, 2012:25). Setelah pembentukan Kabinet Natsir dapat dikatakan menghapus bentuk pemerintahan federalisme dan menjadi sepenuhnya gerakan negara kesatuan.

Penulis telah menyampaikan uraian diatas sebagai sebuah pengantar awal mengenai ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Peranan Sultan Hamengku Buwono IX yang dimulai dari merelakan status Kasultanan Yogyakarta menjadi bagian RI dan menyediakan wilayahnya sebagai Ibukota RI. Pada masa Agresi Militer, Sultan menyusun strategi dan tindakan untuk menyelesaikan keadaan yang tidak kondusif. Selain itu dalam rangka Konferensi Meja Bundar, Sultan juga menjadi seseorang diberikan mandat oleh

sukarno untuk menyiapkan serta menandatangani penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS di Jakarta. Dampak dari KMB, yaitu berubahnya bentuk negara RI menjadi RIS dan menyebabkan berbagai kekacauan dalam bidang keamanan serta tuntutan untuk kembali menjadi Negara Kesatuan, sehingga Sultan yang juga menjadi Menteri Pertahanan harus menyelesaikan permasalahan keamanan tersebut. Permasalahan dapat diselaikan pada tahun 1950 dan mengembalikan bentuk negara menjadi Negara Kesatuan RI.

Penelitian ini dianggap penting karena Sultan Hamengku Buwono IX merupakan orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Cita-cita untuk merdeka dari kekuasaan Asing dilakukan dengan berbagai tindakan penting terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Jiwa demokratis serta optimis Sultan, juga memberikan arah tindakan untuk mempertahankan Republik Indonesia. Meskipun Sultan Hamengku Buwono IX memiliki peranan terhadap Republik Indonesia, sikapnya tidak pernah berubah menjadi orang yang selalu ingin menunjukkan peranannya. Selain itu, tindakan Sultan Hamengku Buwono IX jarang terungkap dan dibicarakan secara luas seperti tokoh pejuang yang lainnya. Maka dari itu, peneliti menganggap peranan Sultan Hamengku Buwono IX pada masa Revolusi (1945-1950) penting untuk diungkapkan agar mencapai sebuah kajian Sejarah Ilmiah. Maka peneliti memilih Judul **“Peranan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950.”**

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan judul merupakan hal penting untuk menghindari terjadinya salah persepsi dan penafsiran mengenai penelitian ini. Penelitian ini mengambil judul, yaitu “Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950”.

Peranan dapat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau status sosial (Soekanto, 2000:268). Status atau kedudukan biasanya didefinisikan sebagai suatu posisi seseorang dalam suatu kelompok untuk mencapai proses interaksi sosial kepada orang lain, kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Status dan peran merupakan suatu hubungan timbal balik dari manusia untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga status

sosial akan memberikan tanggung jawab yang berbeda-beda pada manusia untuk melakukan peran (Horton dan Hunt, 1999:118). Berdasarkan beberapa definisi yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok sesuai dengan tanggungjawab status sosial atau kedudukan yang dimilikinya. Dari penjelasan tersebut tokoh yang dianggap memiliki peran untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seseorang pemilik status sosial dalam proses interaksi sosial kepada orang lain, kelompok, masyarakat ataupun bangsa adalah Sultan Hamengku Buwono IX.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempertahankan mempunyai arti mengusahakan supaya tetap bertahan dan menjaga supaya tidak berubah (Sugono dkk, 2008:1411). Mempertahankan dalam judul ini merupakan gambaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang ingin melaksanakan berbagai macam strategi untuk menjaga keutuhan atau kedaulatan Indonesia. Mempertahankan disini lebih menekankan terhadap sikap dan Strategi tokoh Hamengku Buwono IX terhadap serangan-serangan dari pihak musuh yang ingin merenggut kedaulatan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Konsep kemerdekaan menurut Sultan Hamengku Buwono IX merupakan kebebasan dari tekanan dan harus menjaga dengan menekan amarah. Merdeka bukan berarti harus melakukan hal yang tidak perlu dan menimbulkan kerugian (Kutoyo, 1996:134). Kerugian yang dimaksud, yaitu tindakan kriminal yang mampu menyengsarakan, mebinasakan, serta menguasai milik rakyat Indonesia untuk kepentingan pribadi. Kemerdekaan membawa arus revolusi yang tidak dapat dibendung, bahkan akan dimaklumi jika terjadi kekuatan masyarakat yang melonjak tinggi dan meluas. Maka dari itu Hamengku Buwono IX menginginkan kemerdekaan haruslah dilaksanakan dengan menjaga keamanan di masyarakat dan jangan sampai terjadi kerusuhan.

Berdasarkan uraian diatas maksud yang terkandung dalam judul “Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950”, adalah tindakan dan tanggung jawab Sultan Hamengku Buwono IX dalam peralihan Ibu kota RI, merancang strategi perang dan

diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan RI tahun 1945-1950. Sultan Hamengku Buwono IX menyusun Serangan Umum 1 Maret 1949 menghadapi Agresi Militer Belanda. Dalam perjuangan diplomasi Sultan Hamengku Buwono IX memimpin delegasi RI dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar. Sultan Hamengku Buwono IX juga mengatur proses kembalinya Ibukota RIS ke Jakarta tahun 1949. Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri pertahanan, juga berperan mengawal dan mengamankan kembalinya bentuk negara yang semula berbentuk federal sehingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Semua itu dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Republik Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan fokus permasalahan yang dikaji, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup masalah yang ada, baik dalam ruang lingkup tempat (spasial) dan ruang lingkup waktu (temporal).

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berhubungan dengan peranan tokoh Sultan Hamengku Buwono IX dalam menegakkan kedaulatan Indonesia. Tempat yang difokuskan peneliti adalah negara Indonesia.

Ruang lingkup waktu dalam hal ini dibatasi antara tahun 1945-1950. Tahun 1945 dipilih karena pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Berita tentang kemerdekaan Republik Indonesia terdengar oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Tindakan Sultan, yaitu memberikan dukungan kepada kemerdekaan Republik Indonesia, menjadikan daerah kekuasaannya, yaitu Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian Republik Indonesia. Tahun 1950 dipilih sebagai akhir penelitian karena pada Awal tahun 1950, muncul berbagai gerakan untuk menghendaki diubahnya bentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat yang diakui saat Konferensi Meja Bundar (KMB) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang tersaji diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan untuk dikaji dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang Sultan Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana tindakan Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingi dicapai peneliti dalam penulisan karya tulis ini ialah:

1. Untuk mengkaji secara mendalam latar belakang Sultan Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengkaji secara mendalam tindakan Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik, sehingga nantinya memberi manfaat seperti berikut:

1. bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk mendalami materi sejarah pada masa 1945-1950 dan tokoh Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu, peranan Sultan Hamengku Buwono IX dapat memberikan contoh dan motivasi penulis untuk menjaga kecintaan terhadap Republik Indonesia;
2. bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi mengenai sejarah Indonesia masa 1945-1950 dan peranan tokoh Sultan Hamengku Buwono IX;
3. bagi pemuda, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk mencintai Republik Indonesia, menjaga persatuan, dan menghargai pengorbanan para pahlawan;
4. bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang

bermanfaat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian sejarah merupakan sebuah peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan tentang peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1950. Berbagai penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan Sultan Hamengku Buwono IX dikaji untuk menjadi acuan pendukung, penguat, dan pembenaran terhadap data yang ditemukan. Beberapa karya ilmiah tersebut baik berupa buku maupun skripsi. Disamping itu akan dikemukakan juga pendekatan maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sejumlah teori yang dipaparkan bermanfaat juga sebagai alat pengurai untuk membedah setiap persoalan secara kronologis dan dialektik.

Pembahasan mengenai Sultan Hamengku Buwono IX telah dikaji dalam sebuah tulisan, sehingga dalam tinjauan pustaka ini penulis menggunakan tiga tulisan yang relevan dengan tema Sultan Hamengku Buwono IX. Tulisan tersebut berupa skripsi dari Gandung Mirawan (2012), yang berjudul “*Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menghadapi Kolonialisme di Wilayah Yogyakarta Tahun 1942-1949*” menjelaskan mengenai kepemimpinan sultan dalam menangani pengaruh kolonialisme Jepang maupun Belanda. Pada masa Jepang, Sultan berhasil secara efektif dalam menghadapi kolonialisme di wilayah Yogyakarta dengan memasukkan unsur birokrasi modern kedalam birokrasi Kasultanan Yogyakarta. Sultan juga mencegah *romusha* dengan cara membangun selokan Mataram, sehingga rakyat dialihkan untuk pembangunan selokan dan bukan untuk *romusha*. Kepemimpinan Sultan dalam menanggapi kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah demokratis. Sehingga ketika pemimpin-pemimpin Republik Indonesia di Jakarta mengalami keadaan yang tidak aman, Sultan siap menerima jika Ibukota dipindahkan di Yogyakarta. Ketika pemimpin-pemimpin Republik Indonesia ditawan oleh Militer Belanda, Sultan menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi dengan menolak tawaran Belanda, yaitu menjadikan Sultan sebagai raja di seluruh wilayah Jawa dan Madura. Sultan malah membuat rancangan untuk melakukan Serangan Umum 1 Maret 1945. Puncak dari peranan

Sultan adalah penandatanganan penyerahan kedaulatan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Hubungan penelitian yang ditulis Mirawan (2012) dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas Sultan Hamengku Buwono IX, namun fokus kajian yang akan dilakukan penulis lebih detail dan spesifik, yaitu peranan Sultan Hamengku Buwono IX untuk melakukan peranan secara luas untuk daerah Republik Indonesia, bukan hanya dalam aspek kepemimpinan di wilayah Kasultanan Yogyakarta saja. Sultan Hamengku Buwono IX memiliki peranan yang berdampak bukan hanya bagi wilayah Yogyakarta tetapi lebih dari itu, kajian peranan Sultan Hamengku Buwono IX di wilayah yang lebih luas, yaitu di Indonesia dalam kurun waktu 1945-1950.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Okta Prasetyo (2013), dalam Skripsi yang berjudul "*Peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta*" menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Sultan berperan dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Pertama, menghilangkan tanggapan bahwa seorang raja merupakan antek dari penjajah, yaitu Belanda dan Jepang. Kedua, melanjutkan usaha nenek moyang yang anti penjajah seperti Sultan Agung, Sultan Hamengku Buwono IX, dan Diponegoro. Ketiga, ketika bersekolah dan tinggal di rumah keluarga Belanda, Sultan melihat sendiri para pelayan di rumah Belanda di maki-maki oleh majikan Belandanya. Keempat, Belanda terlalu memaksakan kehendaknya dalam melaksanakan perjanjian politik. Tindaklanjut dari empat latarbelakang tersebut adalah memanfaatkan kedudukan sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta, Jabatan sebagai Menteri Koordinator Keamanan Dalam Negeri, dan nantinya akan dimanfaatkan untuk mengatasi kondisi Agresi Militer II di Yogyakarta. Usaha yang dilakukan, yaitu mengatur strategi dan melaksanakan Serangan Umum 1 Maret 1949. Sultan Hamengku Buwono IX melakukan upayanya Serangan Umum 1 Maret dapat di bagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca serangan. Tahap persiapan, Sultan menyusun rencana untuk melakukan rencana penyerangan yang dapat menggetarkan dunia dengan tidak mengorbankan banyak rakyat dan dilakukan pada siang hari. Tahap pelaksanaan, Sultan melakukan koordinasi dengan

Komandan Gerilya Wehrkreise III, laskar-laskar, dapur umum, palang merah, dan TNI telah bersiap-siap menunggu perintah penyerangan sehingga berhasil menguasai Yogyakarta dalam hitungan jam. Tahap pasca serangan, Sultan dengan tegas menolak tuduhan Belanda bahwa yang melakukan propaganda serangan adalah Sultan. Skripsi Prasetyo (2013), dalam hubungannya dengan penelitian skripsi yang akan ditulis adalah sama-sama membahas mengenai peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, namun jika skripsi Prasetyo berfokus pada latarbelakang sampai tahap pasca Serangan Umum 1 Maret 1949 berupa ketegasan Sultan untuk menolak tuduhan Belanda bahwa yang melakukan propaganda serangan. Sedangkan penulis memfokuskan pada analisis tentang dampak yang diberikan ketika Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan. Dampak dari Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu dunia luar mulai menganggap bahwa perlunya diadakan diplomasi tingkat lanjut dan penyelesaian konflik dengan cara gencatan senjata. Setelah itu, masa saat mempersiapkan perjanjian penyerahan kedaulatan antara Belanda dan Republik Indonesia di KMB belum di tuliskan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan Yudianto (2011), dalam Skripsi yang berjudul "*Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan RI pada Masa Agresi Militer Belanda Kedua*" menjelaskan mengenai latar belakang keluarga, pendidikan, serta penobatan sebagai Sultan. Selain itu mendeskripsikan mengenai sikap Sultan terhadap proklamasi kemerdekaan sampai Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia. Penjelasan inti terletak pada proses dari Agresi Militer Belanda II dan peranan Sultan didalamnya. Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendukung para grilyawan dalam menghadapi Belanda. Dukungan Sultan terhadap grilyawan berupa melindungi di dalam Keraton, pembekalan, serta memberikan sumbangan berupa uang. Selain itu Sultan juga berinisiatif melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini ternyata efektif dalam mendesak Belanda baik di medan pertempuran baik dalam meja diplomasi. Penelitian Yudianto (2011), hubungannya dengan penelitian skripsi yang akan ditulis adalah sama-sama membahas mengenai Agresi Militer II sampai peminjaman konsep yang sama mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 akan membawa dampak dalam

perjuangan diplomasi. Sedangkan fokus yang belum dimunculkan secara spesifik, yaitu berupa masa gencatan senjata dalam perjuangan diplomasi menuju KMB dan merupakan salah satu dampak terbesar dari strategi Sultan Hamengku Buwono IX, yaitu peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Penelitian lain yang mampu menyumbangkan konsepnya, yaitu Tiyana (2013:vol.1, no.2), dalam Jurnalnya berjudul “*Perpindahan Ibu kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946*” yang menyoroti mengenai proses, yaitu latar belakang perpindahan Ibu kota RI yang bermula pada mendaratnya pasukan Belanda sampai kekekacauan yang di lakukan oleh pasukan Belanda. Penjelasan berikutnya, yaitu dampak yang terjadi ketika Ibu kota berpindah ke Yogyakarta. Dampak yang ditimbulkan dari pemindahan Ibu kota bagi Jakarta, yaitu para pemimpin Republik Indonesia dilindungi oleh Kasultanan Yogyakarta, sedangkan rakyat di Jakarta tidak dapat bergerak akibat adanya Belanda. Dampak yang ditimbulkan dari pemindahan Ibu kota bagi Kasultanan Yogyakarta, yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang berada di Yogyakarta. Meskipun Tiyana dalam Jurnalnya menyumbangkan konsepnya, namun akan lebih baik jika memberikan pengembangan penulisan yang lebih mengenai peranan Sultan Hamengku Buwono untuk mengatasi penambahan penduduk. Pertambahan penduduk memberikan dampak dalam bidang sosial ekonomi. Terutama dalam kurun waktu 1945-1950 Republik Indonesia harus berjuang menghadapi blokade ekonomi Belanda.

Penelitian lain yang mampu menyumbangkan konsepnya, yaitu Budi (1997/1998:vol.1, no.2), dalam jurnal yang berjudul “*Permasalahan Sosial Perkotaan pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta 1947-1948*” mendeskripsikan mengenai beban kriminalitas akibat semakin padatnya penduduk semenjak Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia. Kriminalitas di Yogyakarta bertambah lagi setelah perjanjian Renville. Pasukan yang hijrah untuk menjauhi garis Van Mook kemudian menetap di berbagai tempat yang dirasa aman, salah satunya merupakan Ibukota Yogyakarta. Banyaknya penyalahgunaan senjata mengakibatkan semakin buruknya keamanan yang berada di Yogyakarta. Meskipun Budi dalam Jurnalnya menyumbangkan konsepnya, namun akan lebih

baik jika memberikan pengembangan penulisan yang lebih mengenai Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengaplikasikan peranannya terhadap keamanan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah beberapa tulisan yang memiliki beberapa kesamaan dengan yang akan penulis teliti. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama membicarakan persoalan “peristiwa yang memiliki kaitan dengan Sultan Hamengku Buwono IX dan analisis peranan Sultan Hamengku Buwono IX”. Perbedaannya, penulis memfokuskan penelitian ini pada batasan waktu yang berbeda, yaitu 1945-1950 dan cakupan wilayah yang lebih luas yaitu, Republik Indonesia. Selain mereview mengenai tulisan terdahulu. Pada bab ini akan di bahas mengenai, pendekatan, dan teori sebagai ilmu bantu dalam penelitian sejarah.

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara aktor politik, kekuasaan, negara, dan cara mencapai tujuan (Faulks, 2012:2). Sosiologi politik juga merupakan suatu kajian yang mempelajari masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial, dengan politik (Damsar, 2015:12). Peneliti menggunakan batasan definisi politik, yaitu suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum dari berbagai tekanan dan tuntutan-tuntutan dari individu atau kelompok lainnya. Penjelasan ini merupakan usaha untuk menciptakan “kota adil” yang dibicarakan Aristoteles (Duverger, 1996:29). Penegasan mengenai penggunaan pendekatan sosiologi politik, yaitu suatu kajian kekuasaan pemerintah untuk berperan memberikan arah tujuan kepada masyarakat atau suatu bangsa. Kekuasaan dari suatu pemerintahan nantinya akan memberikan dampak kepada perkembangan kehidupan sosial dan pengelolaan konflik. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan cara pemerintah yang sedang menjadi penguasa, untuk mengintegrasikan masyarakat dan bangsanya.

Jika sosiologi politik dapat digunakan sebagai kajian interaksi antara aktor dari pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada negara. Lewis Coser dengan teori konfliknya dapat menjelaskan mengenai keterkaitan konflik untuk membantu mengeratkan ikatan suatu kelompok. Masyarakat yang mengalami

kontak fisik dan berkonflik dengan musuh dapat bersatu sesamanya untuk melawan. Sehingga berfikir untuk melakukan integrasi yang lebih luas dengan yang dianggap satu nasib. Konflik dapat membantu suatu masyarakat untuk lebih maju dan mencari jalan keluar untuk segera menyelesaikannya (Ritzer dan Goodman, 2004:159). Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia pada tahun 1945-1950. Perbedaan dan konflik kepentingan antara Indonesia dan Belanda merupakan permasalahan yang harus memiliki jalan keluar. Indonesia memiliki kepentingan untuk merdeka dan mengusir penjajah, sedangkan Belanda menginginkan Hindia Belanda untuk didirikan kembali dan menjadi penjajah kembali. Perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Belanda akhirnya menimbulkan suatu konflik.

Selain dapat merusak, konflik menurut Lewis Coser dipandang sebagai suatu tindakan untuk mencari penyelesaian. Karena konflik dapat membantu kedua kelompok yang berseteru untuk membangun fungsi komunikasi. Konflik mengakibatkan rasa tidak percaya terhadap musuh. Akan tetapi akibat adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok ini sering menjadi diperjelas dengan berbagai cara penyelesaian. Karena itu pemimpin kelompok bertambah mampu memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hubungannya dengan musuh (Ritzer dan Goodman, 2004:159). Secara tidak langsung ide-ide yang lebih baik akan terbentuk meskipun sebelumnya terjadi kontak fisik dan saling serang. Sehingga kejadian penyerangan-penyerangan berubah menjadi perdamaian.

Alasan menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori konflik milik Lewis Coser, yaitu bisa digunakan untuk mengkaji aktor politik dalam melakukan kebijakan serta cara untuk melakukan interaksi dengan kondisi sosial yang dapat berubah-ubah dan melihat suatu konflik yang berubah menjadi integrasi. Selain itu, kebijakan serta sumbangan pemikiran dari aktor politik ini dapat digunakan untuk mempertahankan kelangsungan negara. Kondisi ini cocok dengan Republik Indonesia pada tahun 1945-1950 yang sedang mengalami berbagai kondisi tidak stabil. Penulis mengangkat aktor politik yang dianggap berpengaruh untuk melakukan tindakan atau kebijakan pada tahun 1945-1950, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1986:32). Metode sejarah berguna untuk mengubah fakta sejarah menjadi cerita sejarah. Terdapat empat langkah penelitian, yaitu: (1) *heuristik*, (2) Kritik, (3) *interpretasi*, dan (4) *historiografi*. Peneliti akan menjabarkan langkah-langkah metodologi sejarah sesuai dengan topik yang telah dipilih. Pemilihan topik disesuaikan dengan kedekatan emosional dan intelektual peneliti. Topik penelitian, yaitu Peranan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950. Selain itu, Peneliti melakukan proses pengkajian menggunakan pendekatan sosiologi politik dan teori konflik milik Lewis Coser.

1. Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian sejarah, yaitu tahap *heuristik* atau pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber berupa arsip, dokumen, buku, artifact, film dokumenter, maupun hasil penelitian berupa jurnal yang berhubungan dengan Hamengku Buwono IX dalam kurun waktu 1945-1950. Sumber-sumber tersebut terdiri dari sumber primer dan sekunder.

Peneliti menggunakan Atmakusumah dalam bukunya berjudul “*Takhta Untuk Rakyat; Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*” sebagai sumber primer. Selain itu peneliti juga menggunakan buku “*Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*” ditulis oleh Cindy Adams merupakan penuturan langsung dari Soekarno. Buku ini juga menyumbangkan pemahaman mengenai kondisi Jakarta serta pemindahannya ke Yogyakarta. Peneliti juga menggunakan buku PERSADJA (persatuan Djaksa Seluruh Indonesia) berjudul, “*Proses Peristiwa Sultan Hamid II*” sebagai sumber primer.

Selain buku, penggunaan dokumen berupa foto berbentuk *digital* tersebut ditemukan di *website* Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta: www.bpad.jogjaprov.go.id. selain itu ditemukan artifact berupa foto di *website* Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD Jateng):

www.arsip.jatengprov.go.id. Dokumen juga akan dicari langsung di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Jogja Library Center: Jl. Malioboro No. 175, Yogyakarta. Pencarian sumber, yaitu berupa sumber primer seperti koran, majalah, dan jurnal era 1945-1950.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku dengan judul *Mengawal Transisi: Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia Di Yogyakarta 1949* karya Aan Ratmanto, buku “*Pelurusan Sejarah: Serangan Oemoem 1 Maret 1949*” karya Sri Endang Sumiyati, buku “*Hamengku Buwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik*” karya Suyono, S, J, dkk, buku “*Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamenku Buwana IX*” karya Ahmad Adaby Darban, dkk, dan buku “*Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan*” karya Kutoyo, S.

Selanjutnya untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut peneliti melakukan penelusuran dengan teknik dokumenter di beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Pendidikan Sejarah Universitas Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan di gedung Grhatama Pustaka: Jl. Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta: Jl Tentara Rakyat Mataram No. 01 Yogyakarta, serta koleksi pribadi dari peneliti.

2. Kritik

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah kritik. Langkah ini dilakukan jika, topik dan sumber-sumber telah dikumpulkan. Kuntowidjoyo (2013:77), menjelaskan bahwa Kritik itu terdapat dua macam, yaitu: (1) kritik ekstern, dan (2) kritik intern. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh keabsahan sumber yang digunakan. Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik.

Peneliti menggunakan kritik ekstern terhadap sumber dengan cara melihat secara cermat dari kertas yang dipakai, tempat memperoleh sumber, bentuk sampul, tahun terbitan, nama pengarang, judul, dan latar belakang penulis. Sedangkan kritik intern digunakan oleh peneliti untuk meneliti isi sumber yang

telah melalui tahap kritik ekstern. Dalam hal ini peneliti akan menguji lagi terkait kredibilitas sumber-sumber yang telah diperoleh. Peneliti tidak hanya melihat bentuk saja tetapi harus memahami isi sumber yang di temukan. Kegunaan kritik intern itu akan menghasilkan fakta yang dapat dipercaya (kredibel) dan dapat diandalkan (reliable).

Buku “*Takhta untuk Rakyat; Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*” merupakan sumber primer yang ditemukan. Memang tahun pembuatan bukan dalam masa perang kemerdekaan atau revolusi (1945-1950). Penguatannya terdapat pada saksi yang langsung mengalami peristiwa perang kemerdekaan atau revolusi (1945-1950), yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu terdapat beberapa tulisan dari orang-orang sejaman, dari Mohamad Roem, Simatupang, A.H Nasution, Moh. Hatta, Sri Paku Alam VIII, dll. Keseluruhan isi memaparkan mengenai peranan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Republik Indonesia. Selain itu peneliti juga menggunakan buku “*Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*” ditulis oleh Cindy Adams merupakan penuturan langsung dari Soekarno. Buku ini juga menyumbangkan pemahaman mengenai kondisi Jakarta serta pemindahannya ke Yogyakarta.

Peneliti menggunakan buku PERSADJA (persatuam Djaksa Seluruh Indonesia) yang berjudul berjudul, “*Proses Peristiwa Sultan Hamid II*” sebagai sumber primer. Buku tersebut merupakan hasil cetakan yang ke dua pada tahun 1955. Buku ini merupakan lampiran-lampiran hasil sidang yang di cetak menjadi buku. Selain itu terdapat penjelasan mengenai kronologis peristiwa yang dilakukan oleh Sultan Hamid II. Penguatan dari buku ini adalah penuturan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai saksi dan Sultan Hamid II sebagai terdakwa. Peristiwa ini berkaitan dengan keputusan kembalian bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Selain itu, kejadian ini juga merupakan dampak dari terpilihnya Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Menteri Pertahanan.

Selain buku, peneliti menggunakan dokumen berupa foto dan media koran sejaman seperti Kedaulatan Rakyat. Sumber tersebut ditemukan di *website* Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta: www.bp.ad.jogjapro.v.go.id.

Media koran Kedaulatan Rakyat Cernter. Selain itu ditemukan artifact berupa foto dalam *website* Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD Jateng): www.arsip.jatengprov.go.id. Tempat memperoleh sumber tersebut dapat dikatakan mampu untuk dipertanggungjawabkan tentang keasliannya. Sumber tersebut ditemukan dalam *website* resmi dari instansi pemerintahan, berupa scan digital yang dapat diunduh.

3. Interpretasi

Setelah melakukan kritik terhadap sumber, peneliti akan memasuki tahap interpretasi. Interpretasi sejarah sering juga disebut sebagai analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu, tahap menguraikan sumber sehingga dapat menyimpulkan kemungkinan-kemungkinan yang terdapat dalam fakta. Sintesis, yaitu merupakan tahap menyatukan atau mengelompokkan fakta-fakta sesuai dengan apa yang akan ditulis (Kuntowijoyo 2013:78-80). Dalam melakukan analisis dan sintesis, peneliti menggunakan pendekatan dan teori. Pendekatan yang digunakan pendekatan Sosiologi Politik. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori konflik milik Lewis Coser.

4. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi yang merupakan hasil rekonstruksi pemaparan secara kronologis, logis, dan sistematis (Kuntowijoyo 2003:80). Proses ini membutuhkan ketelitian dalam merangkai fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atas sumber-sumber sejarah menjadi suatu kisah sejarah ilmiah. Menurut Moh. Ali (2015:62-63), kejujuran dalam usaha menulis cerita sejarah sering dihubungkan dengan istilah objektif dan subjektif. Objektif berarti seperti cermin yang memberikan gambaran sama sekali tidak berbeda dengan aslinya. Sejarah yang objektif seperti ini adalah melukiskan fakta-fakta dengan sama persis dengan kenyataan. Taraf kenyataan ini sangat susah untuk dijangkau, karena kita tidak hidup pada zaman peristiwa itu. Meskipun kita hidup dalam zaman itupun kita tidak mungkin untuk menceritakan sebenar-benarnya kenyataan. Maka jelaslah bahwa penulisan sejarah itu wajar bila subjektif, yaitu menurut pandangan penyusunnya. Subjektif itu seharusnya memiliki maksud

untuk bertanggungjawab, jujur, tidak menipu, dan tidak berat sebelah. Jika cerita sejarah dipandang hanya objektif sebetulnya bukan cerita yang mengandung hal unik dan menarik. Bahkan cerita sejarah yang seperti itu akan hanya menjadi daftar waktu, suatu tabel, atau rangkaian tahun dan fakta.

Penyajian dalam karya tulis ini tersusun secara sistematis diantaranya, yaitu: Bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang dilaksanakan penelitian, penegasan judul, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian; Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi tentang *review* penelitian terdahulu, serta pendekatan dan teori yang digunakan peneliti untuk mengkaji objek yang dijadikan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik. Teori yang dipakai adalah teori konflik milik Lewis Coser; Bab 3 Metode Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang langkah penelitian. Penulisan sejarah memiliki empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi; Bab 4 menjelaskan mengenai latar Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam bab tersebut akan dibahas mengenai pemikiran Sultan yang Demokratis, serta pemikiran optimis terhadap kemerdekaan RI akan membawa dampak yang baik bagi rakyat. Pemikiran tersebut menyebabkan sultan memberanikan diri untuk menyambut serta bergabung dengan Republik Indonesia; Bab 5 diperlukan penjelasan analisis mengenai strategi Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan RI di Ibu kota Yogyakarta. Dimulai dari strategi pemindahan Ibu kota RI di Yogyakarta, menghadapi Agresi Belanda, sampai perjuangan Sultan dalam diplomasi di KMB. Selain itu juga terdapat penjelasan analisis mengenai Kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dalam KMB diakui sebagai negara federal Republik Indonesia Serikat. Hal ini merupakan dampak dari perjanjian KMB yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; dan Bab 6 Penutup terdiri dari simpulan penelitian yang telah dituliskan. Bab ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah secara singkat.

BAB 4. LATAR BELAKANG SULTAN HAMENGKU BUWONO IX MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI TAHUN 1945-1950

Menelaah peran Sultan Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950, dirasa sangat penting untuk mengetahui berbagai latar belakang tindakan-tindakannya. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai perjalanan hidup dan arah tujuan Sultan Hamengku Buwono IX membantu Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Sehingga pembahasan pada sub bab akan bersinggungan dengan sikap yang dimiliki Sultan Hamengku Buwono IX untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tindakan seperti merelakan status Kasultanan Yogyakarta menjadi bagian Republik Indonesia, menyediakan tempat perlindungan dan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, sampai menjadi pusat pertahanan terakhir untuk mengakhiri Agresi Militer II. Hal tersebut membutuhkan pengorbanan dan kondisi Sultan Hamengku Buwono yang berjiwa demokratis dan optimis terhadap kemerdekaan Indonesia sehingga berkeinginan menghilangkan kekuasaan asing. Jiwa demokratis dan optimis ini menjadi latarbelakang Sultan Hamengku Buwono IX mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Uraian ini nantinya akan dibahas dalam sub bab dengan lebih mendalam.

4.1 Sultan Hamengku Buwono IX Berjiwa Demokratis

Dorodjatun yang dilahirkan pada tanggal 12 April 1912 adalah anak dari Gusti Pangeran Puruboyo (Sultan Hamengku Buwono VIII) dan Raden Ajeng Kustilah. Sebelum diangkat menjadi raja Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX memiliki nama lahir, yaitu Dorodjatun. Sikap demokratis Dorodjatun telah dibentuk sejak kecil, ketika ayahnya melakukan cara mendidik anak yang lain dari pada pendahulunya. Pilihan Hamengku Buwono VIII dalam memberikan pendidikan pada putra-putranya, yaitu menjauhkan hidup penuh sanjungan dan selalu dimanja di dalam keraton. Karena membiasakan hidup penuh sanjungan dan dimanja akan tidak menguntungkan bagi kemajuan putra-putranya. Sehingga kepribadian putra-putranya diharuskan untuk hidup mandiri.

Sejak kecil Dorodjatun diberikan pendidikan modern dan dititipkan kepada kenalannya dari keluarga Belanda. (Majalah Tempo, 1988:17-18). Kondisi dalam lingkungan keluarga Belanda dapat mempengaruhi pembentukan karakter Dorodjatun, terlebih lagi secara tidak langsung Dorodjatun juga mempelajari cara berkomunikasi menggunakan bahasa Belanda.

Keluarga Belanda yang pernah mengasuh Dorodjatun adalah keluarga Johannes Bernard Tjebbes Mulder, seorang kepala sekolah di *Neutrale Hollands Javaanse Jogen School* yang tinggal di Gondokusumo. Kebiasaan dan cara hidup yang penuh disiplin secara tidak langsung juga diikuti oleh Dorodjatun. Dorodjatun oleh keluarga Johannes Bernard Tjebbes Mulder diberikan nama kesayangan, yaitu Henky. Pemberian nama tersebut diambil dari seorang pangeran Hendrik, nama depan dari suami Ratu Wilhemnina dari negeri Belanda. Nama Henky menjadi panggilan akrab Dorodjatun selama bersekolah dan bergaul dengan teman-teman Eropanya (Wibowo, 2014:6). Sehingga muncul kedekatan emosional antara kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga Mulder dan pergaulannya dengan anak-anak Belanda. Akan tetapi, kedekatan emosional tersebut tidak menghilangkan kepribadian asli Dorodjatun, yaitu sebagai orang Jawa.

Dorodjatun memiliki perpaduan landasan budaya pendidikan, yaitu barat dan timur. Pendidikan barat meliputi sekolah modern milik Belanda dan pendidikan timur adalah pendidikan didalam keraton Yogyakarta. Pendidikan dalam sekolah Belanda, mampu mengenalkan kepada Dorodjatun pada nilai-nilai modern yang mengasah rasionalitas, kemandirian, demokrasi, dan sikap disiplin. Sedangkan di dalam keraton Dorodjatun mendapatkan pendidikan internal, untuk mengasah rasa, kepribadian, pitutur, dan berbagai etiket adat tradisi (Suyono, dkk, 2016:39). Sehingga Dorodjatun terbiasa untuk memadukan antara budaya barat dan timur melalui pendidikan. Mempelajari dua budaya sekaligus akan menjadikan kepribadian Dorodjatun mudah untuk memberikan ruang perbedaan pendapat dan berani untuk memulai perubahan.

Dorodjatun pada masa remaja juga memiliki pergaulan yang luas, tidak hanya dengan saudara-saudaranya tetapi juga dengan anak-anak Eropa. Karena

telah terbiasa mandiri, Dorodjatun menjadi seseorang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Dorodjatun juga sering menghabiskan waktu dengan rakyat biasa dan anak-anak abdi dalem. Dorodjatun bermain layaknya anak-anak biasanya dan tidak membeda-bedakan status sosialnya. Cara hidup yang sederhana inilah nantinya akan memberikan keterbukaan terhadap pandangannya mengenai kekuasaan dan hubungannya dengan rakyat (Wibowo, 2014:12-13). Sultan Hamengku Buwono VIII juga memiliki alasan mendidik Dorodjatun dengan cara mendekati dengan Belanda, yaitu mempelajari karakter serta cara berfikir masyarakat Belanda sehingga Dorodjatun terbiasa untuk berhadapan dengan Belanda.

Sultan Hamengku Buwono VIII kemudian mengirim Dorodjatun untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda. Pendidikan Dorodjatun bermula di Hoogere Bruggerschool (HBS) di Harlem dan dilanjutkan di ranah universitas di *Rijks Universiteit*, kota Leiden, Belanda. Jurusan yang diambil adalah Indologi, yaitu studi mengenai gabungan antara bidang politik dan ekonomi. Menjadi mahasiswa di Belanda ternyata mampu membukakan wawasan politik yang lebih luas kepada dunia luar. Dorodjatun aktif dalam klub diskusi mengenai politik dan ekonomi yang dipimpin oleh guru besar, yaitu Prof. Schrike. Dorodjatun memang sering mengikuti diskusi politik, tetapi menjauh dari aktifitas pergerakan politik. Karena seorang calon Sultan akan selalu diawasi dan dibatasi segala bentuk tindakannya terkait pergerakan politik (Atmakusuma, 2011:18-20). Akan tetapi, keaktifan Dorodjatun terhadap diskusi politik dan ekonomi, telah membukakan wawasan yang luas terhadap perkembangan dunia internasional.

Terlebih lagi selama menjalani masa perkuliahan, Dorodjatun benar-benar membuka cakrawala barunya, termasuk bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa Belanda yang terkenal cerdas. Meskipun tidak melakukan pergerakan politik, Dorodjatun tetap mencari cara untuk mempelajari perkembangan politik dan ekonomi yang ada di dunia. Pencarian wawasan tersebut dituangkan dalam ikut aktifnya menjadi bagian organisasi mahasiswa di Belanda. Organisasi-organisasi yang diikuti adalah *Leidse Studentencorps* pernah menjabat sebagai komisaris I, *Verenigde Faculteiten* menjabat sebagai ketua organisasi, dan perkumpulan

Minerva yang anggotanya terdiri dari elite bangsawan (Widyatama, 2017:11). Melalui berbagai organisasi dan diskusi itulah Dorodjatun mengasah intelektualitasnya, termasuk mengasah kemampuan organisasi. Hal ini berguna untuk Dorodjatun ketika diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono IX. Karena wawasan yang telah dimiliki selama menjadi mahasiswa di Belanda akan bermanfaat dalam setiap pengambilan keputusan. Baik dengan Belanda ataupun pihak yang mengancam ketentraman selama Sultan Hamengku Buwono IX memimpin Kasultanan Yogyakarta.

Dalam tradisi Kasultanan Yogyakarta, salah satu simbol bahwa kekuasaan akan dialihkan kepada keturunannya yang dikehendaki sebagai raja adalah pemberian pusaka berupa keris *Kyai Jaka Piturun*. Namun penyerahan pusaka itu masih belum cukup bagi pandangan Dorodjatun (Widyatama, 2017:15). Langkah yang paling penting adalah penentuan secara sah secara musyawarah, yaitu pembentukan panitia penentuan sultan baru. Anggota panitia penentuan sultan adalah putra-putra dari Sultan Hamengku Buwono VII dan Sultan Hamengku Buwono VIII. Dalam forum tersebut, Dorodjatun ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin musyawarah. Sikap demokratis Dorodjatun muncul, ketika akan diambil keputusan, Dorodjatun menanyakan kembali terkait adanya keinginan diantara anggota panitia penentuan sultan yang ingin mencalonkan diri sebagai Sultan Hamengku Buwono IX. Akan tetapi, tidak ada pernyataan mengenai tidak setujunya Dorodjatun diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono IX (Atmakusuma, 2011:16). Sikap ini menyebabkan wibawa Dorodjatun sebagai Sultan Hamengku Buwono IX sangatlah dihargai oleh pihak keluarga. Selain itu, jabatan sebagai Sultan Hamengku Buwono IX dianggap sebagai tanggungjawab yang besar. Sehingga harus dibicarakan bersama untuk mewujudkan keadilan didalam internal Kasultanan Yogyakarta.

Selain pendidikan modern terdapat suatu perspektif filosofi budaya Jawa, yang membuat seseorang pemimpin dapat bertindak adil dan menolak segala bentuk kejahatan. Seorang raja yang arif haruslah tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tetapi memihak kepada rakyatnya. Prespektif tersebut secara tidak langsung mengandung maksud bahwa kepemimpinan Jawa sebenarnya

penuh dengan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, seperti tertuang dalam prinsip *sura dira jayaningrat bakal lebur dening pangastuti* yang berarti orang yang menyalahgunakan kekuasaan akan hancur oleh orang yang berbudi pekerti luhur. Prinsip tersebut dipegang teguh oleh Sultan Hamengku Buwono IX sehingga setiap keputusan yang akan dikeluarkan cenderung jauh dari kesewenang-wenangan terhadap rakyat (Widyatama, 2017:141). Tindakan penolakan terhadap penjajahan Belanda adalah bentuk dari pedoman hidup tersebut. Sultan Hamengku Buwono IX mempelajari budaya dan karakter orang-orang Belanda dalam dunia pendidikan dan pergaulan. Sehingga berguna untuk menolak kesewenangan dari Belanda dengan cara yang selama ini dipelajari selama remaja.

Belanda tidak pernah mencurigai pergerakan politik Dorodjatun, dikarenakan sejak awal tidak terlalu dekat dengan aktivitas pergerakan politik semasa menempuh pendidikan di Belanda. Meskipun setelah Dorodjatun diangkat menjadi Hamengku Buwono IX, belum pernah dalam pidato-pidatonya sebelum tahun 1945 menyebut nama Indonesia. Dalam pidatonya Sultan sering memakai kata “Jawa” atau “Jawa Baru”. Sehingga Belanda yakin Raja Kasultanan Yogyakarta ini tidak terpengaruh oleh tokoh-tokoh nasionalis Indonesia (Suyono dkk, 2016:3). Perkiraan Belanda salah, Sultan merupakan seorang penyelamat Republik yang bermain peran-peran penting dibalik layar. Sultan memiliki sikap demokratis dan optimis terhadap lepasnya kekuasaan asing.

Jiwa demokratis Sultan yang berkaitan dengan Republik Indonesia terlihat ketika gejolak revolusi dari rakyat yang mulai menyebar akibat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang raja, Hamengku Buwono IX tidak hanya mengambil keputusan politik untuk dirinya sendiri. Setiap keputusan yang diambilnya tentu berpengaruh langsung pada rakyat dan wilayah yang dikuasainya. Memutuskan untuk berpihak pada salah satunya Indonesia/Belanda sama dengan memperhadapkan diri Sultan, kepada rakyat, dan kekuasaannya kepada perseteruan pada salah satu pihak. Sebagai seorang raja, keselamatan kerajaan pada saat itu sama dengan menyelamatkan diri, keraton, wilayah, dan rakyat yang mempercayainya. Dari catatan sejarah, keputusan yang diambilnya bukan hanya inisiatif pribadi seorang raja saja melainkan kehendak sebagian besar

rakyat yang dipimpinya. Rakyat berkehendak untuk menghilangkan bentuk penjajahan asing di Yogyakarta. Sehingga kehendak itu dapat dikatakan harus berseberangan dengan kaum kolonial Belanda (Luthfi, 2009:15). Sultan Hamengku Buwono IX yang memegang teguh prinsip *sura dira jayaningrat bakal lebur dening pangastuti*, memutuskan untuk mendukung kehendak rakyat untuk bebas dari kesewenangan penjajah. Sultan Hamengku Buwono IX bergabung dan mendukung perjuangan Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pilihan untuk bergabung dan mendukung perjuangan Republik Indonesia berkonsekuensi untuk menyiapkan barisan perlawanan kepada kaum penjajah. Sehingga rakyat dan Sultan Hamengku Buwono IX harus mempersiapkan diri terhadap kekecewaan Belanda.

Bagi Sultan Hamengku Buwono IX, proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang penting. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah pembuka jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan batin dan jalan bebas yang ditempuh untuk menentukan nasib bangsa dikemudian hari. Menanggapi Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Hamengku Buwono IX segera memanggil Sri Paku Alam VIII dan KRT Honggowongso, seorang staf senior di kepatihan. Pada waktu itu Sultan meminta pertimbangan kepada Sri Paku Alam VIII untuk menyikapi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Paku Alam VIII setuju dengan pendapat Sultan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Sehingga melalui pertimbangan Paku Alam VIII, Dorodjatun mengambil suatu keputusan yang pasti, yaitu memberi dukungan kepada kemerdekaan Indonesia yang sudah lama dicita-citakan oleh rakyat Indonesia yang telah lama dijajah. Selanjutnya, KRT Honggowongso diperintahkan mempersiapkan sebuah telegram dukungan kemerdekaan Republik Indonesia kepada Sukarno dan Hatta (Darban dkk. 1998:32). Tindakan Sultan Hamengku Buwono IX tersebut menggambarkan seorang yang berjiwa demokratis, yaitu tidak mengambil keputusan sepihak dan merelakan status kerajaan berada di belakang Republik Indonesia. Hal itu dilakukan untuk kepentingan bersama dan kemerdekaan rakyat.

Tidak hanya menjadikan Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Sultan Hamengku Buwono IX juga memberikan wilayahnya

sebagai tempat berlindung pemerintahan Republik Indonesia. Sultan memberikan sumbangan hartanya untuk bertanggungjawab dengan keputusan yang telah diambilnya. Jika dihitung, sumbangan harta yang di berikan untuk gaji para staf kenegaraan saja bisa mencapai 5 juta Gulden. Belum lagi tanah dan berbagai fasilitas milik keraton yang di gunakan untuk keperluan rakyat dan kelangsungan Republik Indonesia (Darban, 1998:50). Keputusan Sultan untuk mengizinkan Yogyakarta dijadikan ibukota merupakan tindakan yang demokratis. Jika Sultan Hamengku Buwono IX tidak memberikan tindak lanjut kepada Republik Indonesia yang lemah perekonomiannya dan tidak mengizinkan wilayah Yogyakarta dijadikan Ibukota, bisa jadi Republik Indonesia saat itu mudah untuk dihancurkan.

Sikap demokratis adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa dan rakyat mampu merasakan pengaruh dari kebijakan yang telah diambil. Demokratis berarti menjalankan segala sesuatu secara bersama dan menghindari keputusan sepihak (Beetham dan Boyle, 2000:22-23). Sultan Hamengku Buwono IX dapat dikatakan menghargai dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Hamengku Buwono IX tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak. Segala yang akan dilakukan pasti akan dibicarakan secara musyawarah terlebih dahulu. Terlebih lagi kepada Paku Alam VIII yang menjadi teman berdiskusi jika ingin mengambil keputusan penting. Sehingga keseimbangan antara kepentingan keraton dan Republik Indonesia dapat dijalankan secara bersamaan.

Sikap demokratis Sultan Hamengku Buwono IX selalu di aplikasikan dalam bentuk nyata dan terus melekat di kehidupan sehari-harinya. Hal itu berkaitan dengan rasa cintanya terhadap kesetaraan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Pemikiran megenai adil dan menolak segala bentuk kejahatan merupakan tujuan hidup masyarakat Jawa. Terlebih lagi kepada seorang pemimpin yang akan membawa pengaruh kepada rakyatnya. Selain itu, adanya wawasan yang luas mengenai perkembangan politik dan ekonomi internasional serta memahami karakter Belanda dapat berdampak pada keputusan Sultan Hamengku Buwono IX yang demokratis.

4.2 Sultan Hamengku Buwono IX Berjiwa Optimis

Salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan penobatan seorang raja adalah pidatonya. Karena didalam pidato penobatan terdapat suatu pandangan serta sikap setelah menjabat sebagai raja dan akan menjadi acuan hidup Sultan Hamengku Buwono IX beserta rakyatnya. Sehingga ketika Sultan Hamengku Buwono IX membuat suatu keputusan, haruslah mencerminkan pidato penobatan tersebut (Widyatama, 2017:19). Adapun pidato Sultan Hamengku Buwono IX sebagai berikut:

Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, tetapi pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya (Atmakusuma, 2011:47).

Dari pidato tersebut ada dua hal utama yang ingin disampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Pertama, sebagai seorang tokoh yang telah merasakan pendidikan di Eropa khususnya Belanda. Mempertemukan jiwa Barat, yaitu ide-ide mengenai demokrasi dan etika orang Timur (Jawa) untuk berjalan berdampingan. Inilah yang mengakibatkan Sultan Hamengku Buwono IX optimis untuk menjadi pembaharu. Kedua, Sultan Hamengku Buwono IX adalah menegaskan diri sebagai seorang *republikan*, yaitu sosok yang ingin terlepas dari belenggu penjajahan dan pembaharu dalam mencapai kesatuan. Oleh karena itu, Sultan Hamengku Buwono IX ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan nusa dan bangsa Kasultanan Yogyakarta. Jika dianalisis, nusa dan bangsa juga dapat diartikan sebagai mempererat rasa persatuan. Pada saat berpidato Sultan Hamengku Buwono IX mengobarkan optimisme seorang pembaharu dan akan memperjuangkan sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada.

Nilai-nilai mengenai kesatuan sebenarnya telah diajarkan oleh Sultan Hamengku Buwono I. Pembelajaran mengenai kesatuan untuk penerusnya

dituangkan kepada lambang Keraton Yogyakarta yang dibangun pada 1756 Masehi atau tahun Jawa 1682. Lambang Keraton berupa dua naga yang saling melilit merupakan simbol tahun pendirian Keraton Yogyakarta. Simbol dan setiap angka dalam pendiriannya memiliki arti penting. Tahun 1682 dibaca dari belakang (2=*dwi*, 8=*naga*, 6=*rasa*, 1=*tunggal*) dapat dibaca sebagai *dwi naga rasa tunggal* selain itu dapat dibaca *dwi nagara satunggal* yang memiliki arti “dua negara menjadi satu”. Makna sederhananya terletak pada akar historisnya ketika pembagian kerajaan Mataram Islam, “meskipun Mataram Islam terpecah menjadi dua, hakikatnya adalah satu (Baskoro & Sunaryo, 2010: 8). Sehingga dapat diambil pengertian bahwa Sultan Hamengku Buwono I menekankan kepada nilai-nilai kesatuan. Sehingga Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penerusnya harus optimis mengedepankan rasa persatuan. Seperti yang telah diamanatkan oleh Sultan Hamengku Buwono I kepada para penerusnya.

Pada tahun 1942, Jepang mulai memasuki Indonesia dan kemudian berhasil menduduki Yogyakarta. Salah satu strategi politik yang dilakukan Belanda untuk tetap memiliki pengaruh di Indonesia yaitu dengan mengajak Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengungsi ke Australia. Tawaran tersebut dengan tegas ditolak oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Tidak hanya penolakan Sultan Hamengku Buwono IX ternyata memanfaatkan kedatangan Jepang. Peran Papatih Dalem diambil alih untuk membalikkan pembatasan kekuasaan oleh Belanda. Karena pada jaman Belanda, Papatih Dalem membatasi ruang publik Sultan dan lebih pro terhadap Belanda sehingga rakyat menjadi terpecah belah (Widyatama, 2017:21). Pengambilalihan peran Papatih Dalem itu menjadi kunci Sultan Hamengku Buwono IX untuk bisa hadir di hadapan publik secara langsung dan mendapatkan apresiasi besar dari publik. Selain itu Sultan Hamengku Buwono IX dapat menyebarkan pandangannya mengenai kesatuan.

Kasultanan Yogyakarta adalah suatu wilayah istimewa sejak zaman Belanda atau biasa disebut wilayah *Voorstenlanden*. Hal ini berarti wilayah Kasultanan Yogyakarta tetap menjadi bagian dari wilayah jajahan pemerintah kolonial Belanda dengan skema jajahan tidak langsung. Status daerah istimewa oleh Jepang ternyata juga masih dilaksanakan (Hadi dan Majidi, 2013:98).

Dengan kata lain jika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, maka ada kemungkinan bahwa Belanda akan kembali berkuasa di Hindia Belanda dan daerah Yogyakarta kembali menjadi jajahan tidak langsung. Sehingga dibutuhkan persatuan untuk membendung datangnya kekuasaan asing.

Sultan Hamengku Buwono IX tidak begitu saja ingin dikuasai oleh pihak asing. Ketika Indonesia merdeka, Yogyakarta tidak langsung menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan. Sultan Hamengku Buwono IX harus memutuskan untuk lebih memilih ikut dengan Republik Indonesia atau merdeka sendiri. Ramalan Jayabaya pada saat itu sangat dipercaya keakuratannya oleh masyarakat Jawa. Sehingga optimisme rakyat untuk lepas dari penjajahan semakin meningkat. Semangat persatuan dari rakyat dimanfaatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX untuk memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Karena Sultan Hamengku Buwono IX juga membutuhkan persatuan yang lebih luas untuk membendung Belanda yang ingin berkuasa kembali. Maka keputusan untuk lebih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah keputusan yang terbaik daripada memberikan kepada orang asing.

Sultan Hamengku Buwono IX adalah salah satu tokoh yang menentang kolonialisme serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada Masa Agresi Belanda di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX tegas dalam menangani Belanda. Optimisme Sultan Hamengku Buwono IX dalam melanjutkan perjuangan Republik Indonesia, dibuktikan dengan penolakan tawaran Belanda yang menggiurkan. Ajakan menjadikan Sultan sebagai Raja di pulau Jawa dan Madura ditolak secara tegas (Kresna, 2011:363). Sikap anti penjajahan Sultan Hamengku Buwono IX merupakan salah satu pendorong untuk bersikap optimis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap ini selalu diwariskan oleh Pendahulu Sultan Hamengku Buwono IX yang merupakan raja-raja penentang kolonialisme (Baskoro dan Sunaryo, 2011:40-42).

Selain memegang teguh nilai persatuan yang diamanatkan Sultan Hamengku Buwono I, optimisme Sultan Hamengku Buwono IX untuk mempertahankan Republik Indonesia dan menentang kolonialisme juga berasal dari wisik. Dalam kepercayaan raja Jawa, wisik dari nenek moyang dapat

membantu pada saat menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan (Sunoyo, 2016:14). Wisik yang pertama kali dialami Sultan Hamengku Buwono IX ketika mendapat kesulitan dalam kontrak politik dengan Belanda pada tahun 1939. Kontrak politik ini dilakukan oleh Dorodjatun dan Gubernur Lucien Adam. Isi kontrak politik itu sangat merugikan Kasultanan Yogyakarta. Kontrak politik itu berisi tentang kedaulatan Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Meskipun Sultan Hamengku Buwono IX berwenang untuk membuat peraturan untuk kepentingan rakyat, tetapi peraturan tersebut baru sah jika disetujui oleh pihak Belanda (Baskoro & Sunaryo, 2010:12). Perjanjian ini merupakan persyaratan untuk Raden Mas Dorodjatun menjadi Sultan Hamengku Buwono IX. Pada awalnya Dorodjatun menolak kontrak politik yang merugikan itu. Dorodjatun akhirnya menerima ketika mengalami wisik berupa mimpi bahwa Belanda pasti akan segera keluar meninggalkan Kasultanan Yogyakarta. Karena itu Dorodjatun bertekad untuk menandatangani (Kutoyo, 1996:93).

Sultan menelaraskan wisik dengan pemikiran yang rasional. Wawasan luas karena pendidikan dan pergaulan pada masa remaja adalah salah satu faktor utamanya. Wawasan mengenai perkembangan politik dunia sebagai landasan pengambilan keputusan, dan wisik sebagai nasihat untuk memutuskan sesuatu. Selain itu Sultan Hamengku Buwono IX juga mempercayai ramalan Jayabaya. Sultan Hamengku Buwono IX membuktikan sendiri kebenaran ramalan Jayabaya tersebut dengan perginya penjajahan Jepang yang hanya seumur jagung. Hal ini juga memicu Sultan Hamengku Buwono IX untuk menyiapkan langkahnya untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka, Kasultanan Yogyakarta sudah memikirkan tentang bergabung dengan Republik Indonesia. Kasultanan Yogyakarta mengadakan rapat *abdi dalem* untuk membahas bentuk negara, susunan negara, batas wilayah, perekonomian negara Indonesia, serta tentara untuk pertahanan. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Sultan menyiapkan kebutuhan internal keraton dan Kasultanan Yogyakarta juga mengirimkan beberapa utusannya untuk pergi ke Jakarta, yaitu BPH Puroboyo, BPH Bintoro, Ki Hadjar Dewantara, Dr. Sukiman (tokoh Masyumi), Ki Bagus Hadikusumo (tokoh Muhammadiyah), dan KH Kahar

Muzakir (Hoesein dalam Hadi dan Majidi, 2013:150-151). Hal ini dilakukan agar tidak ada konflik ketika Sultan Hamengku Buwono IX ikut bergabung dengan Republik Indonesia.

Sultan Hamengku Buwono IX yakin dengan Kemerdekaan Indonesia. Karena memahami penjajahan tidak lebih baik daripada kemerdekaan rakyat. Sehingga Sultan Hamengku Buwono IX harus mencari cara untuk mengintegrasikan Republik Indonesia dan Kasultanan Yogyakarta. Selain mempersiapkan kondisi di dalam Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX dapat membaca semangat rakyat dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga keputusan untuk bergabung dengan Republik Indonesia tidak mendapatkan kecaman dari rakyat dan kaum terpelajar di Yogyakarta.

Landasan pengambilan keputusan bergabung dengan Republik Indonesia, yaitu nilai-nilai persatuan yang diamanatkan melalui lambang keraton oleh pendiri Kasultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengku Buwono I, sikap anti penjajahan, wawasan mengenai perkembangan politik, dan wisik leluhur. Sikap anti penjajahan merupakan suatu ciri khas untuk memulai suatu perubahan kearah kemerdekaan. Sikap anti penjajahan milik Sultan Hamengku Buwono IX dilandasi dengan wawasan mengenai perkembangan politik dunia dan perpaduan pemikiran timur yang khas dengan memegang teguh nilai-nilai tradisional. Penjajahan asing berarti menggeser nilai-nilai tradisional yang selalu dipegang teguh. Selain itu, kemerdekaan rakyat tidak terjamin dan sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab harus mengambil kembali hak-hak rakyat tersebut. Menuju masyarakat yang terjamin kemerdekaannya maka diperlukan pengambilan keputusan. Dalam kepercayaan raja kasultanan Yogyakarta pengambilan keputusan harus dilandasi nasihat dari para leluhur kerajaan Mataram.

Sultan Hamengku Buwono IX tidak menginginkan penjajahan asing dan tidak menginginkan kemerdekaan dari rakyat direnggut. Sehingga ketika Indonesia menemui titik terang untuk merdeka. Sultan lebih memilih untuk bergabung. Selain menerima pertimbangan dari wisik, Sultan mempertimbangkan keinginan rakyat untuk ikut mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Hal

inilah yang mengakibatkan Sultan Hamengku Buwono IX optimis mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan kepada Republik Indonesia termasuk memindahkan ibukota, sampai menyusun strategi perlawanan merupakan suatu keputusan yang didasari suatu sikap optimis.



BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sultan Hamengku Buwono IX memiliki sikap demokratis dan optimis. Sikap tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dimasa remajanya. Pendidikan modern ciri khas Belanda dan Pendidikan tradisional Jawa ciri khas dalam Keraton Yogyakarta adalah perpaduan untuk mengasah sikap demokratis dan optimis Sultan. Sehingga membentuk latarbelakang karakter Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap demokratis dan optimis Sultan Hamengku Buwono IX selalu di aplikasikan dalam bentuk nyata dan terus melekat di kehidupan sehari-harinya. Hal itu berkaitan dengan rasa cintanya terhadap kesetaraan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sikap optimisnya didasari oleh kepercayaan terhadap wisik leluhur dan dipadukan dengan wawasan luas terhadap perkembangan dunia.

Perpindahan ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta juga memiliki dampak buruk, yaitu menjadi target utama dari penyerangan Belanda. Ibukota Yogyakarta tidap bisa bertahan pada Agresi Militer Belanda II. Sehingga menyebabkan ibukota dikuasai oleh Belanda. Selain itu, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan sebagian pejabat negara ditangkap dan diasingkan oleh belanda. Melaksanakan tanggungjawab menjaga pemerintahan yang berada di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX melakukan tindakan penyerangan terhadap Belanda. Serangan tersebut berhasil dilakukan pada 1 Maret 1949 yang telah dikomunikasikan dengan Jenderal Sudirman, Suharto, dan para gerilyawan. Penyebab dari serangan ini adalah merubah pandangan dunia terhadap keberadaan Republik Indonesia dan menghapuskan propaganda Belanda jika Indonesia telah tidak ada. Sehingga oleh PBB dilanjutkan dalam meja perundingan dan diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar. Sultan Hamengku Buwono IX diberikan mandat kekuasaan penuh oleh Sukarno dalam penyelesaian konflik Belanda dan Indonesia sebelum penyerahan kedaulatan. Selain itu Sultan Hamengku Buwono IX diberi mandat mengenai penandatanganan penyerahan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar di Jakarta.

Bentuk federal yang tercipta dari Konferensi Meja Bundar menciptakan suatu konflik di berbagai daerah Indonesia. Terdapat kelompok yang mendukung bentuk negara kesatuan dan kelompok federal yang lebih menginginkan Republik Indonesia Serikat harus tetap berdiri. Konflik yang terus berlanjut akhirnya menimbulkan pemberontakan dari Westerling di negara bagian Pasundan. Sehingga mengakibatkan 60 orang tentara APRIS yang bertugas terbunuh. Terdapat alasan lain dalam pemberontakan Westerling, yaitu terkait inti dari APRIS adalah TNI. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dalam kubu militer Belanda dan para kau federalis.

Pemberontakan Westerling sebenarnya telah disiapkan untuk menyerang sidang kabinet di Jakarta dan membunuh para menteri secara langsung. Westerling yang bekerjasama dengan Sultan Hamid II akhirnya gagal. Sultan Hamengku Buwono IX berhasil mengetahui rencana tersebut. Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan menyebabkan pengaruh tokoh federalis semakin berkurang. Sehingga negara Pasundan serta negara Kalimantan Barat berhasil untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Dampak dari lemahnya pengaruh tokoh federalis mengakibatkan gerakan terhadap penyatuan negara bagian kepada Republik Indonesia semakin terwujud. Akhirnya Sukarno pada 17 Agustus 1950, menutup berakhirnya bentuk negara federal dengan mengucapkan pidato proklamasi kembalinya negara Indonesia yang berbentuk kesatuan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan adalah.

- a. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi warga negara terkait dengan Sultan Hamengku IX terhadap peranannya dalam mempertahankan bentuk negara kesatuan di Indonesia;
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar mengenai Sejarah Nasional Indonesia khususnya mengenai Sultan Hamengku IX terhadap peranannya dalam mempertahankan bentuk negara kesatuan di Indonesia.

- c. Bagi akademisi, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan pembaca diharapkan dapat menambah dan mengembangkan penelitian mengenai peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan Republik Indonesia pada tahun 1945-1950.
- d. Para pemimpin Republik Indonesia harusnya mencontoh sikap budi luhur Sultan Hamengku Buwono IX dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat, serta melakukan tindakan untuk mempertahankan nilai-nilai kesatuan di dalam Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T dan Lopian, A,B. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah 6: Perang dan Revolusi*. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Abdullah, T dan Lopian, A,B. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah 7: Pascarevolusi*. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Adams, C. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Agung, I. A. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ali, R. M. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Atmakusumah. 2011. *Takhta Untuk Rakyat; Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Baskoro, H dan Sunaryo. 2010. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baskoro, H dan Sunaryo. 2011. *Wasiat HB*; Yogyakarta Kota Republik. Yogyakarta: Galangpress.
- Beetham, D dan Boyle, K. 1995. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budi, S. L. 1997/1998. Permasalahan Sosial Perkotaan Pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta 1947-1948. *Lembar Sejarah* 1(2): 40-54.
- Darban, A. A., Sri, S., Nurcahyo, A. L., Setyawati, N., dan Nurdiyanto. 1998. *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamenku Buwana IX*. Jakarta: Depdikbud.
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Duverger, M. 1996. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Faulks, K. 2012. *Sosiologi Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Gottschalk, L. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

- Hadi, P dan Majidi, N. 2013. *Sultan Hamengku Buwono IX: Inspiring Prophetic Leader*. Jakarta: IRIS.
- Hardjosoediro, S. 1987. *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Horton, P. B, dan Chester L. H. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Joehanda, W, K. 2017. *Djocjakarta: Mereka [Pernah] Ada di Sini Des 1948-Juni 1949*. Yogyakarta: Matapadi Presindo.
- Kresna, A. 2011. *Sejarah Panjang Mataram: Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Diva Press.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kutoyo, S. 1996. *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Luthfi, A, N. 2009. *Keistimewaan Yogyakarta: yang Diingat dan yang Dilupakan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Masjkuri dan Kutoyo, S. 1982. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Matasani, P. 2007. *Westerling; Kudeta yang Gagal*. Jakarta: MedPress.
- Mirawan, G. 2012. *Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menghadapi Kolonialisme di Wilayah Yogyakarta Tahun 1942-1949*. Tidak diterbitkan. *Skripsi*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Moedjanto. 2014. *Sukarno, Hatta, dan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Nasution, A.H. 1996. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1: Proklamasi*. Bandung: Angkasa.
- PERSADJA. 1955. *"Proses Peristiwa Sultan Hamid II"*. Jakarta: Penerbit Fasco.
- Prasetyo, O. 2013. *Peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta*. Tidak diterbitkan. *Skripsi*.

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan. Jember: Universitas Negeri Jember.

Purwadi. 2006. *Sejarah Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta: Hanan Pustaka.

Ratmanto, A. 2012. *Mengawal Transisi: Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintahan Transisi Republik Indonesia Di Yogyakarta 1949*. Jakarta: Mata Padi Pressindo.

Riclefs, M. C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Ritzer, G dan Goodman, D, J. 2004. *Teori Sosiologi Modern; Edisi ke 6*. Jakarta: Prenada Media

Sebuah Presentasi Majalah Tempo. 1988. *Sri Sultan: Hari-Hari Hamengku Buwono IX*. Jakarta: PT Grafiti.

Sumiyati, S. E., Chidmad, T., dan Hartono, B. 2001. *Pelurusan Sejarah: Serangan Oemoem 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Soemardjan, S. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.

Soekamto, R, E. 2009. *Yogyakarta: Ibukota Perjuangan*. Yogyakarta: NARASI.

Soekanto, S. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suyono, S. J. dkk. 2016. *Hamengku Buwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik*. Jakarta: KPG.

Sugono, D., dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Tino, K. 2010. *Dari Serangan Umum 1 Maret sampai Melawan Soeharto*. Yogyakarta: NAVILA IDEA.

Tobing, K.M.L. 1987. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Roem-Royen dan KMB*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Triyana, H. 2000. Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. *Jurnal Avatara* 1(2):204-214.

Wibowo, B. 2014. *Gusti Raden Mas Dorodjatun dari Jogjakarta hingga Negeri Belanda (1912-1939)*. Yogyakarta: BPAD DIY.

Widyatama, B. 2017. *Demokrasi sebagai Siasat Menafsirkan Tapak Politik Demokrasi Sultan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta: PolGov

Yudianto. 2011. Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mempertahankan Kedaulatan RI pada Masa Agresi Militer Belanda Kedua. Tidak diterbitkan. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Arsip

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, tanggal 7 Januari 1946.

Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan No. S/4 Tahun 1949.

Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan No. R.I./3 Tahun 1949, tentang Pembatasan Kemerdekaan Berkumpul dan Bersidang.

Lampiran A. Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
Sejarah Nasional Indonesia	Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950	a. Jenis Penelitian, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Sejarah b. Sifat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Kepuskatakaan (Studi Literatur) 	a. Bagaimana latar belakang Sultan Hamengku Buwono IX mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? b. Bagaimana tindakan Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1950?	a. Sumber Primer (Buku Pokok) b. Sumber Sekunder (Buku Penunjang) c. Dokumen-dokumen dan Jurnal Ilmiah Majalah	a. Metode Penelitian dengan langkah-langkah: <ul style="list-style-type: none"> • Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi b. Pendekatan: <ul style="list-style-type: none"> • pendekatan sosiologi politik c. Teori : Teori Konflik milik Lewis Coser.

Lampiran B. Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37, Kampus Bumi Tegalboto, Jember 68121
Telepon: 0331-334988, 330738, Faximile: 0331-332475
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor **1795** /UN25.1.5/LT/2018
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

27 FEB 2018

Yth. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini.

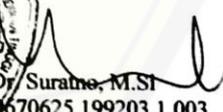
Nama : Ony Widiarto
NIM : 140210302018
Jurusan : Ilmu Pendidikan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Bermaksud melaksanakan penelitian tentang "Peranan Hamengku Buwono IX dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950", di Instansi yang Saudara pimpin.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Dr. Suratno, M.Si
19670625 199203 1 003
Wakil Dekan I.



Lampiran C. Amanat 30 Oktober 1945

A M A N A T

**SERI PADOEKA INGKENG SINOEWON KANGDJENG SULTAN HAMENKOE BOEWANA IX
DAN SERI PADOEKA KANGDJENG GOESTI PANGERAN ADIPATI ARJA PAKORALAM VIII,
KEPALA DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPOEBLIK INDONESIA.**

- Mengingat:
1. dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan-rakyat dan keadilan-sosial,
 2. amanat Kami berdoea pada tanggal 5-1-1945,
 3. bahwa kekeuasaan-kekeuasaan yang dahuloe dipegang oleh Pemerintah Djadjeher (dalam djaman Belanda didjalankan oleh Goepnoer dengan kantornja, dalam djaman Djepang oleh Koti-Zimukyoku-Tyokan dengan kantornja) telah direboet oleh rakyat dan diserahkan kembali pada Kami berdoea,
 4. bahwa Kommissaris-Tinggi pada tanggal 22-10-1945 di Kepatihan Jogjakarta dihadapan Kami berdoea dengan disaksikan oleh para Pambesar dan para Pemimpin telah menjatakan tidak perloenja akan adanja Subcommissariaat dalam Daerah Kami berdoea,
 5. bahwa pada tanggal 29-10-1945 oleh Komite Nasional Daerah Jogjakarta telah dibentoeok soeatoe Badan-Pekerdja yang dipilih dari antara anggauta-anggautanja, atas kehendak rakyat dan panggilan masa, yang disertai oentoeok mendjadi Badan Legislatief (Badan Pembikin Undang-undang) serta toeroet menentoeokan haloean djalannja Pemerintahan Daerah dan bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Daerah Jogjakarta,

maka Kami, Seri Padoeka Ingkeng Sinoewon Kangdjeng Sultan Hamengkoe Boewana IX dan Seri Padoeka Kangdjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Pakoe Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, se-moefakat dengan Badan-Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogjakarta, dengan ini menjatakan:

Soepaja djalannja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdoea dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan-Pekerdja terseboet adalah soeatoe Badan Legislatief (Badan Pembikin Undang-undang) yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam Daerah Kami berdoea oentoeok membikin Undang-undang dan menentoeokan haloean djalannja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdoea yang sesoesai dengan kehendak rakyat.

Kami memerintahkan soepaja segenap pendoedoek dalam Daerah Kami berdoea mengindahkan Amanat Kami ini.

JOGJAKARTA, 24 Doelkaidah Ehb 1 8 7 6
atau 30 Oktober 1 9 4 5.

HAMENKOE BOEWANA IX

PAKOE ALAM VIII

Sumber: Baskoro, H dan Sunaryo. 2011. Wasiat HB; Yogyakarta Kota Republik. Yogyakarta: Galangpress

Lampiran E. Surat Kawat yang dikirimkan keluarga Simatupang terhadap Kolonel Hidayat di PDRI

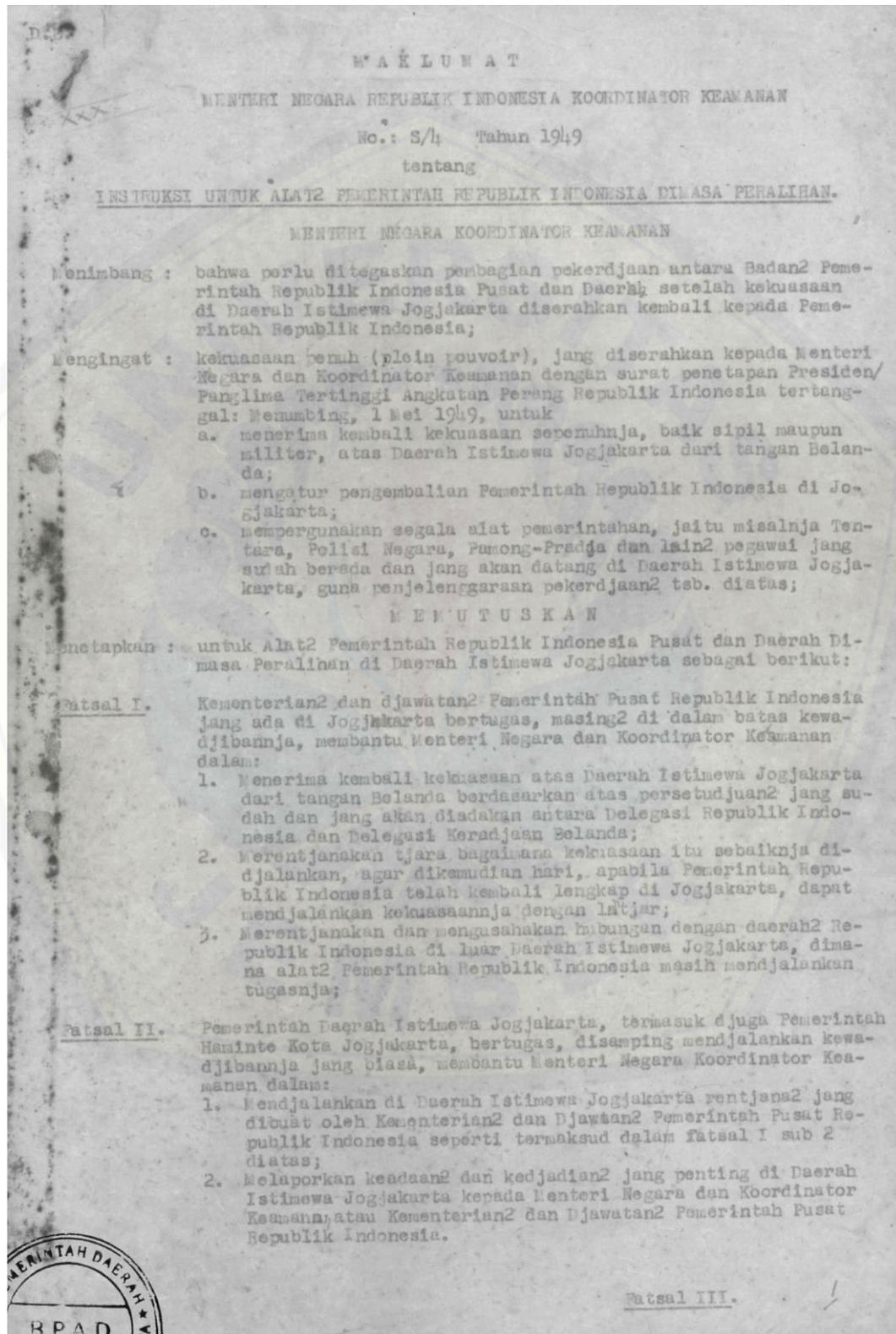
102 025 12/2 1900 =
C. J.
pdri / kol Hidayat
145 / 15/2 - 49

tanggal 29/ 49 th

1. kabar dari rapat antara commissariaat pusat didjawa terdiri dari dr. Sukiman, mr. busanto, supeno, kasimo dan pimpinan tentera di djawa th
2. atjara terpenting a.l. penghimpunan pemerintah militer di djawa, pengadjaran, peraturan pengadilan darurat, pajak, dan koordinatif dengan pdri th
3. datang hadir qub. mil. djawa barat let. kol. abimanyu dan commissaris untuk djawa barat is. ukar th
4. kepulauan negara dibawah commissaris sosrodarmo - kusumo berdjalan terus th
5. non cooperation seluruh djawasemangkin teratur, kaum jurist dan guru telah memutuskan untuk non cooperatif th
6. pertjoeraan belanda utl membuka sekolah & gagal kerna pelajar semuanya turut berdjangan th
7. setelah sri sultan menjatakan tak mau berdjama pamong brodjo seluruh djokja menjakang pendirian belian dan rakyat mengambil resolutie tetap memandang sri sultan pemimpin dan sedia mendjalankan tiap putusan th
8. aksi militer belanda sekarang bersifat pembalasan terhadap rakyat berhubung qulja jang sangat merugikan belanda atau bersifat kempasan harta dan bahan makanan th
9. tgl 28/ - 49 sbelah barat djokja kampung & diserbui belanda, lebih dari 100 rakyat menjadi korban diantaranya 16 dipotong kepala di desa kalima djang th

Sumber: bpadjogja.info

Lampiran F. Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan No. S/4 Tahun 1949.



- Fatsal III. 1a. Guna melantjarkan djalannja Pemerintahan, maka harus diadakan hubungan jang erat antara Badan2 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, antara lain dengan tjara2 sebagai tersebut dibawah ini:
- a) Dalam hal2 jang mengenai Pemerintah Pusat dan Daerah Istimewa Jogjakarta harus diadakan perundingan antara Kementerian atau Djawatan Pemerintah Pusat jang bersangkutan dengan Pemerintah Daerah, dalam mana antara lain harus ditetapkan instansi manakah jang diwadjibkan mendjalankan (uitvoering) sesuatu hal.
 - b) Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta dimana perlu diwadjibkan menempatkan seorang atau dua orang pegawai di Kementerian2 atau Djawatan2 Pemerintah Pusat, sedang sebaliknya Kementerian2 dan Djawatan2 Pemerintah Pusat perlu diwadjibkan menempatkan seorang atau dua orang pegawai pada Djawatan2 Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Djikalau tentang sesuatu hal tidak terdapat persesuaian pendapat antara Badan2 Pemerintah Pusat ataupun antara suatu Kementerian atau Djawatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, maka Menteri Negara Koordinator Keamanan memberi putusan.

- Fatsal IV. Menjimpai dari jang tersebut dalam fatsal II sub 1 diatas, maka urusan perihal jang tersebut dibawah ini tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta untuk didjalankan:
- a. Urusan luar Negeri;
 - b. " Pertahanan;
 - c. " Kehakiman, Mahkamah Agung dan Kedjaksanaan Agung;
 - d. " perumahan dan gedung2 Negeri;
 - e. " perhubungan dengan daerah Republik Indonesia di luar Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - f. " penerangan keluar Negeri dan kedaerah Republik Indonesia diluar Daerah Istimewa Jogjakarta.
 - g. " keuangan jang tidak mengenai Daerah Istimewa Jogjakarta.
 - h. Hal2 lain jang dapat ditentukan dikemudian hari.

- Fatsal V. Dalam hal2 jang tersebut diatas, maka diharap adanya nasehat2 dan usul2 dari:
- a. Para anggota Badan Pekerdja KNIP dan Dewan Pertimbangan Agung jang ada di Jogjkarta terhadap pekerdjaan Kementerian dan Djawatan2 Pemerintah Pusat;
 - b. Dewan2 Pemerintah Daerah dan Kota Jogjkarta terhadap pekerdjaan Pemerintah Daerah Istimewa termasuk Kota Jogjakarta.

- Fatsal VI. Instruksi ini berlaku sampai kekuasaan pemuh jang diserahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia kepada Menteri Negara dan Koordinator Keamanan ditjabut kembali.-

Jogjakarta, 14 Djuni 1949.

Menteri Negara
dan
Koordinator Keamanan:

tt. Hamengku B.

Diumumkan di Jogjakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1949.

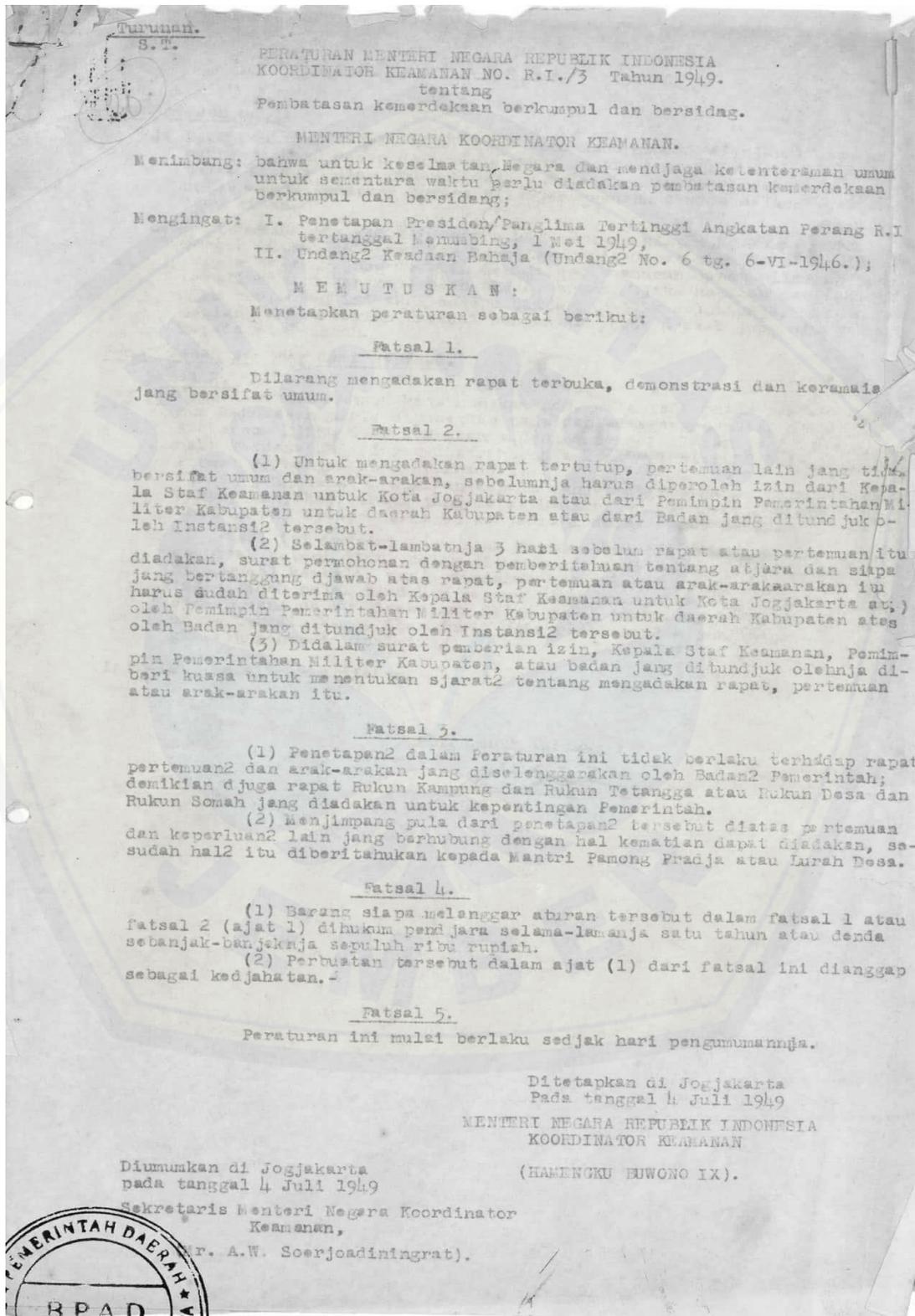
Sekretaris Menteri Negara:

tt.Mr.A.W.Soerjoadiningrat.



Sumber: BPAD DIY

Lampiran G. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan No. R.I./3 Tahun 1949, tentang Pembatasan Kemerdekaan Berkumpul dan Bersidang.



P E N D J E L A S A N .

Pendjelasan umum:

1. Peraturan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk melenjapkan atau me-
ngurangi hak2 dasar dari pada warga negara Indonesia seperti yang
telah diakui dalam Undang2 dasar, melainkan suatu tindakan darurat
untuk menjelamatkan Negara Kita yang sedang berada dalam keadaan
luar biasa.
2. Untuk membangun kembali Negara kita dengan alat2nja, maka sjarat
mutlak adalah keamanan dan keamanan hanya dapat terdjamin apabila
segala sesuatu yang mungkin mengganggu keamanan dapat dilarang sama
sekali atau dikontrol oleh alat2 Negara. Djika keadaan mengizinkan
maka peraturan ini akan segera ditjabut, baik seluruhnja, maupun se-
bagian dari sebagian, sesuai dengan tanggung djawab yang dipikulkan
kepada Penserintah.

Pendjelasan sepasal demi sepasal.

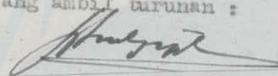
Pasal 2.

Sesuai dengan maksud kesatuan komando, maka pada fase pertama se-
mula kekuasaan perlu dipusatkan pada dan dipegang sendiri oleh Staf
Keamanan. Djika Staf Keamanan sudah mempunyai alasan yang tjukup,
maka kekuasaannya dapat diserahkan kepada Instansi2 lain (Polisi
Pensu P. Pradja/Mantri P. Pradja).
Sjarat2 yang dapat diberikan kepada penjelenggara rapat ialah tentat
waktu, banjaknja orang yang dapat hadir, tempat rapat, siapa yang
bertanggung djawab terhadap kedjadian2 dalam rapat d.s.b.

Pasal ini memberi kesempatan kepada chalajak untuk sekedar ber-
gembira, tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa sebelum keadaan mendja
di normal kembali, perlu diadakan sjarat2 untuk mendjaga keamanan,
ialah tidak boleh diadakan pertundjukan umum, (wajang, ketoprak dsb
sjarat mana dapat disebutkan dalam surat idzin. Djuga dilarang kera
untuk bermain kartu (berdjudi) pada pertemuan2 yang dapat diselen-
garakan menurut pasal ini.

Lain-lain pasal sudah djelas.

Jang ambil turunan :



Lampiran H. Foto



Gambar 1. (1947) Upacara Penghormatan kepada HB IX atas penghargaan Pemerintah Pusat dengan diangkatnya menjadi Jendral Kehormatan. (Sumber: bpad.jogjaprovo.go.id)

Kedadaan di Yogyakarta dan sekitarnya waktu Belanda mengadakan serangan udara tgl. 21/7/1947.



Gambar 2. (Agresi Militer I) TNI dan rakyat bersiap siaga di sudut jalan kota yogya saat Belanda mengadakan serangan udara. (Sumber: arsip.jatengprov.go.id)



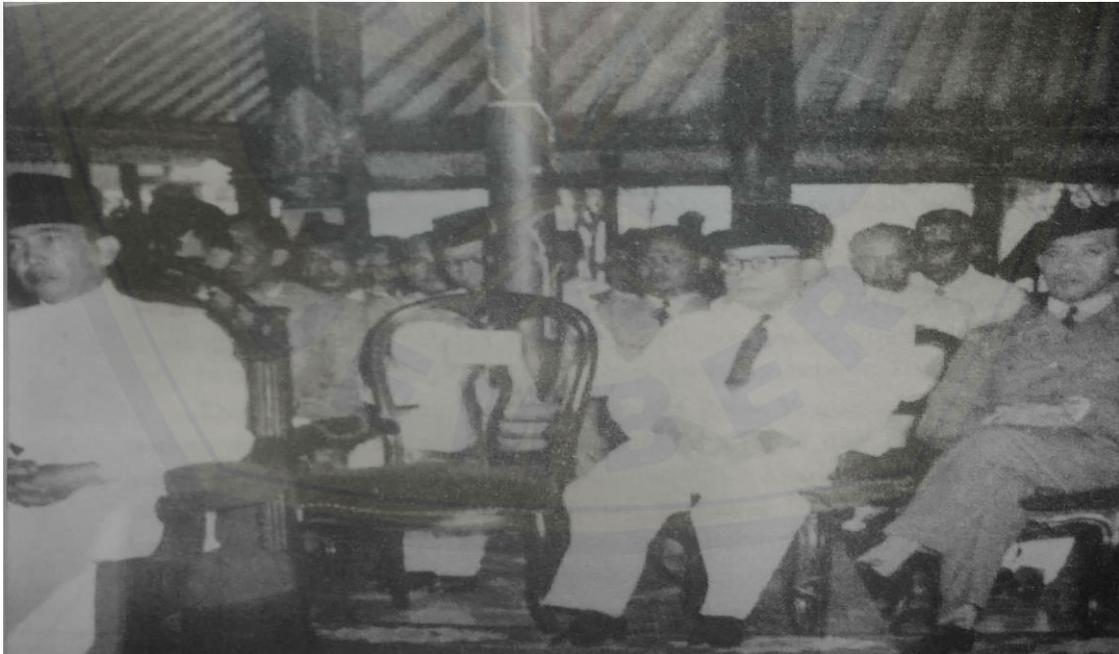
Gambar 3. (Agresi II) para wartawan sedang mengamati bangunan milik AURI yang hancur akibat serangan udara Belanda di lapangan udara Manguwo. (Sumber: arsip.jatengprov.go.id)



Gambar 4. Sultan Hamengku Buwono IX, Presiden Sukarno, dan Wakil Presiden Moh. Hatta di Bangka 1949 (Sumber: Suyono, S. J. dkk. 2016. *Hamengku Buwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik*. Jakarta: KPG)



Gambar 5. (1949) Penyambutan kedatangan rombongan pejabat Pemerintah RI di Maguwo Yogyakarta tampak H.Moh.Hatta berjabat tangan kepada Sri Sultan HB IX. (Sumber: bpad.jogjaprov.go.id)

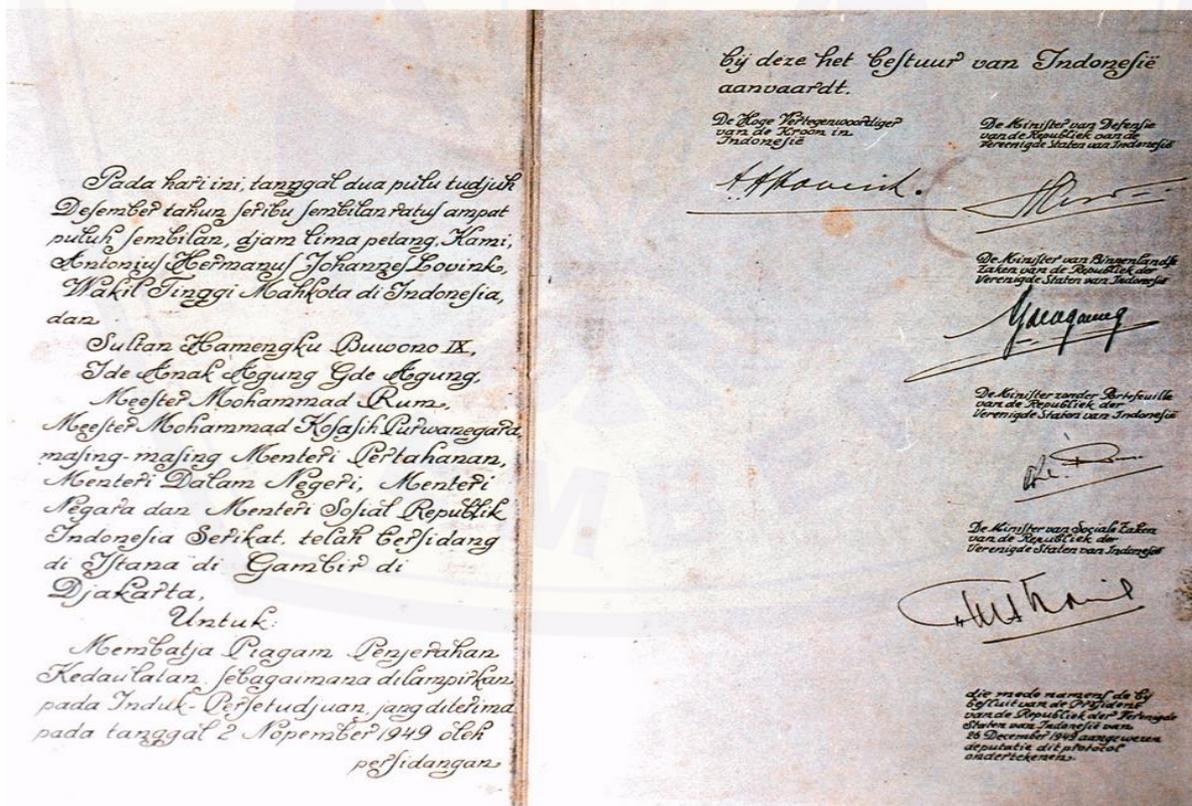


Gambar 6. Sultan Hamengku Buwono IX duduk di samping Moh. Hatta dalam acara pelantikan Sukarno sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1949 yang digelar di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. (Sumber: Baskoro, H dan Sunaryo. 2011. Wasiat HB; Yogyakarta Kota Republik. Yogyakarta: Galangpress)



Barpusda Jawa Tengah

Gambar 7. Penandatanganan penyerahan kedaulatan dari pemerintah belanda yang di wakili Mr. Lovink dan pemerintah Indonesia yang diwakili Hamengku Buwono IX di istana negara Jakarta. (Sumber: arsip.jatengprov.go.id)



Gambar 8. (27-12-1949) Piagam penyerahan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia. (Sumber: bpad.jogjaprov.go.id)



Gambar 9. Sultan Hamenku Buwono IX dan Lovink keluar dari Istana Merdeka (Sumber: Youtube, dipublikasikan 19 Agustus 2016 oleh Yakob Daud Auraruskar; Konferensi Meja bundar 1949).



Gambar 10. Sultan Hamenku Buwono IX dan Lovink mengadakan upacara pengibaran bendera Indonesia (Sumber: Youtube, dipublikasikan 19 Agustus 2016 oleh Yakob Daud Auraruskar; Konferensi Meja bundar 1949).



Gambar 11. (KMB) jabat tangan antara wakil pemerintah belanda Lovink dan wakil pemerintah Indonesia Sultan Hamengku Buwono IX di halaman istana negara



Gambar 12. Sultan Hamenku Buwono IX menyambut Sukarno di lapangan terbang Kemayoran (Sumber: Youtube, dipublikasikan 19 Agustus 2016 oleh Yakob Daud Auraruskar; Konferensi Meja bundar 1949).



Gambar 13. Sultan Hamenku Buwono IX duduk di sebelah Sukarno, mengantar ke gedung Istana Merdeka (Sumber: Youtube, dipublikasikan 19 Agustus 2016 oleh Yakob Daud Auraruskar; Konferensi Meja bundar 1949).



Gambar 14. Sultan Hamenku Buwono IX mendampingi Sukarno saat berpidato di depan gedung Istana Merdeka (Sumber: Youtube, dipublikasikan 19 Agustus 2016 oleh Yakob Daud Auraruskar; Konferensi Meja bundar 1949).